

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

**LAPORAN KEUANGAN SEMESTER
I SKPD TA. 2019**

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Operasional

Laporan Perubahan Ekuitas

BAB. I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

BAB. II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Kebijakan Teknis

2.2 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

2.3 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

BAB. III KEBIJAKAN AKUNTANSI

3.1 Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi Keuangan Daerah

3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

3.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi

BAB. IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

4.1 Rincian dari Penjelasan Masing-masing Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD

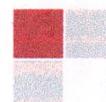
4.1.1 Penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

4.1.2 Penjelasan pos-pos Laporan Operasional

4.1.3 Penjelasan pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

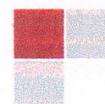
4.1.2 Penjelasan pos-pos Neraca

4.2 Informasi Tambahan

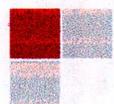


LAMPIRAN-LAMPIRAN

- a. Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Lampiran I.2
- b. Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Lampiran II (rinci)
- c. Daftar rincian Persediaan dan Berita Acara *Stock Opname* Persediaan Pakai Habis dan Barang Operasional Lainnya per 30 Juni 2019
- d. Daftar pembayaran utang belanja 2018
- e. Daftar/bukti memorial atas tambahan hutang tahun 2019
- f. Daftar NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)
- g. Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) atas hibah dari Pemerintah Pusat//Provinsi/Kabupaten lain/pihak ketiga
- h. Laporan dana yang dikelola oleh SKPD selain dana dari APBD
- i. Daftar Perolehan Aset Tetap Tahun 2019 yang berasal dari APBD
- j. Daftar aset tetap: tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jembatan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan dan aset lainnya (dari aplikasi SIMBADA)
- k. Kertas Kerja Penyusutan
- l. Surat Keputusan Penghapusan Aset
- m. Surat Keputusan Penilaian Aset
- n. Surat Keputusan Reklasifikasi Aset
- o. Berita Acara Pemusnahan Barang
- p. Surat Keputusan Bupati (SK) tentang pemberian hibah kepada masyarakat dan berita acara serah terima barang (dalam APBD adalah belanja yang diserahkan kepada masyarakat)
- q. Rincian Barang ke Neraca (dari aplikasi SIMBADA)
- r. Daftar aset yang dipinjam/dipakai/digunakan oleh pihak ketiga dan dilengkapi dokumennya (jika ada)
- s. KIB extracomptable yang berisikan :
 - Barang/aset yang harga perolehannya dibawah batas kapitalisasi (berlaku pengadaan mulai tahun 2010)
 - Barang/aset yang sudah dihapuskan akan tetapi belum dimusnahkan/dilelang
- t. Berita Acara Lelang
- u. Daftar UP/TUP dan daftar SP2D nihil



- v. Bukti setor saldo UP/TUP dan bukti setor pengembalian belanja LS (*Contra Post*) tahun 2019
- w. Copy Rekening Koran Bendahara Pengeluaran Per 30 Juni 2019
- x. Daftar nama PNS Berdasarkan Pangkat dan Golongan



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kotawaringin Barat yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Operasional; (c) Laporan Perubahan Ekuitas; (d) Neraca; dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

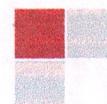
Pangkalan Bun,

2019

Pengguna Anggaran



Ir. M. ROSIHAN PRIBADI, M.Si
NIP. 19650502 199102 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK SEMESTER I SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2019

(dalam rupiah)

No	URAIAN	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d Semester Pertama	Prognosis	Keterangan
1	PENDAPATAN					
2	Pendapatan Asli Daerah					
3	Pendapatan Pajak Daerah			-	-	
4	Pendapatan Retribusi Daerah			-	-	
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			-	-	
6	Lain-Lain PAD yang Sah			-	-	
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-	
8						
9	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah					
10	Pendapatan Hibah			-	-	
11	Pendapatan Dana Darurat			-	-	
12	Pendapatan Lainnya			-	-	
13	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	-	-	-	-	
14	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-	
15						
16	BELANJA					
17	Belanja Operasi					
18	Belanja Pegawai	218.489.592.000,00	91.218.246.224,00	127.271.345.776,00	127.271.345.776,00	
19	Belanja Barang	34.286.693.429,00	5.165.046.995,00	29.121.646.434,00	29.121.646.434,00	
20	Belanja Bunga					
21	Belanja Subsidi					
22	Belanja Hibah					
23	Belanja Bantuan Sosial					
24	Belanja Bantuan Keuangan					
25	Jumlah Belanja Operasi	252.776.285.429,00	96.383.293.219,00	156.392.992.210,00	156.392.992.210,00	
26						
27	Belanja Modal					
28	Belanja Tanah			-	-	
29	Belanja Peralatan dan Mesin	6.130.185.000,00	8.000.000,00	6.122.185.000,00	6.122.185.000,00	
30	Belanja Gedung dan Bangunan			-	-	
31	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	51.091.768.563,00		51.091.768.563,00	51.091.768.563,00	
32	Belanja Aset Tetap Lainnya			-	-	
33	Belanja Aset Lainnya	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	
34	Jumlah Belanja Modal	57.226.953.563,00	8.000.000,00	57.218.953.563,00	57.218.953.563,00	



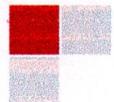
35					
36	JUMLAH BELANJA	310.003.238.992,00	96.391.293.219,00	213.611.945.773,00	213.611.945.773,00
37					
38	SURPLUS/DEFISIT	(310.003.238.992,00)	(96.391.293.219,00)	(213.611.945.773,00)	(213.611.945.773,00)

Pangkalan Bun, 2019

Pengguna Anggaran,

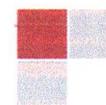


Ir. M. ROSIHAN PRIBADI, M.Si
 NIP. 19650502 199102 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK SEMESTER I SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

Kode Akun	URAIAN	30 Juni 2019	2018
	KEGIATAN OPERASIONAL		
8	PENDAPATAN-LO		
8.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	10.000,00
8.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	-	10.000,00
8.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah		
8.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
8.1.4	Lain-lain PAD yang Sah		10.000,00
8.2	PENDAPATAN TRANSFER -LO	-	-
8.2.1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan		
	Dana Bagi Hasil Pajak		
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		
	Dana Alokasi Umum		
	Dana Alokasi Khusus		
8.2.2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya		
	Dana Otonomi Khusus		
	Dana Penyesuaian		
8.2.3	Transfer Pemerintah Propinsi		
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		
8.2.4	Bantuan Keuangan		
8.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	-	
8.3.1	Pendapatan Hibah		
8.3.2	Pendapatan Darurat		
8.3.3	Pendapatan Lainnya		
9	BEBAN	100.833.309.749,08	233.520.043.824,50
9.1	BEBAN OPERASI	100.833.309.749,08	233.520.043.824,50
9.1.1	Beban Pegawai	90.827.603.544,00	180.084.553.055,00
9.1.2	Beban Persediaan	2.043.002.150,00	11.576.588.913,39
9.1.3	Beban Jasa	2.485.855.618,00	21.510.650.174,59
9.1.4	Beban Pemeliharaan	34.042.532,00	865.118.790,00
9.1.5	Beban Perjalanan Dinas	576.820.195,00	4.440.240.075,00
9.1.6	Beban Bunga		
9.1.7	Beban Subsidi		
9.1.8	Beban Hibah	22.650.000,00	5.356.221.396,36
9.1.9	Beban Bantuan Sosial		
9.1.10	Beban Penyusutan	4.826.889.160,08	9.653.778.320,16
9.1.11	Beban Amortisasi	16.446.550,00	32.893.100,00
9.1.12	Beban Penyisihan Piutang		
9.1.13	Beban Lain-lain		
9.2	BEBAN TRANSFER	-	-
9.2.1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi		
9.2.2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		
9.2.3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		
9.2.4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		
9.2.5	Beban Transfer Keuangan Lainnya		
	JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI OPERASI	(100.833.309.749,08)	(233.520.033.824,50)
9.3	KEGIATAN NON OPERASIONAL	-	(1.180.049.028,15)
	SURPLUS NON OPERASIONAL		



	Surplus Penjualan Aset Non Lancar		
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		
	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		
	Jumlah Surplus Non Operasional	-	-
	DEFISIT NON OPERASIONAL		
	Defisit Penjualan Aset Non Lancar		1.180.049.028,15
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		
	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		
	Jumlah Defisit Non Operasional	-	1.180.049.028,15
	JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	-	(1.180.049.028,15)
	SURPLUS/ DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(100.833.309.749,08)	(234.700.082.852,65)
9.4	POS LUAR BIASA		
	PENDAPATAN LUAR BIASA		
	Pendapatan Luar Biasa		
	Jumlah Pendapatan Luar Biasa	-	-
	BEBAN LUAR BIASA		
	Beban Luar Biasa		60.090.268.472,86
	Jumlah Beban Luar Biasa	-	60.090.268.472,86
	POS LUAR BIASA	-	(60.090.268.472,86)
	SURPLUS/ DEFISIT - LO	(100.833.309.749,08)	(294.790.351.325,51)

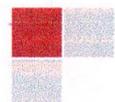
Pangkalan Bun,

2019

Pengguna Anggaran,



Ir. M. ROSIHAN PRIBADI, M.Si
NIP. 19650502 199102 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2019

(dalam Rupiah)

No	Uraian	s.d 30 Juni 2019
1	EKUITAS AWAL	(725.097.873.638,65)
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	(100.833.309.749,08)
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	
4	KOREKSI NILAI PIUTANG	-
5	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	
6	SELISIH REVALUASI ASET TETAP	
7	KOREKSI PENYUSUTAN ASET TETAP	
8	KOREKSI AMORTISASI	
9	KOREKSI DOUBLE CATAT	
10	LAIN-LAIN	
11	EKUITAS AKHIR	(825.931.183.387,73)

Pangkalan Bun,

2019

Pengguna Anggaran,



Ir. M. ROSIHAN PRIBADI, M.Si
NIP. 19650502 199102 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NERACA
PER 30 JUNI 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

No	Uraian	30 Juni 2019	31 Desember 2018
1	ASET		
1.1	ASET LANCAR		
	Kas dan Setara Kas		
	Kas Yang di batasai Penggunaanya		
	Kas di Bendahara Pengeluaran	673.030.000,00	
	Kas di Bendahara Penerimaan		
	Kas BOS	1.284.814.816,18	1.284.814.816,18
	Kas JKN		
	Kas BLUD		
	Kas BOS		
	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		
	Piutang Pajak		
	Piutang Retribusi		
	Penyisihan Piutang		
	Beban Dibayar Dimuka		
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi		
	Piutang Lainnya		
	Penyisihan Piutang Lainnya		
	Persediaan	76.829.632,00	74.153.132,00
	Jumlah Aset Lancar	2.034.674.448,18	1.358.967.948,18
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Non Permanen		
	Investasi Permanen		
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
1.3	ASET TETAP		
	Tanah	22.182.850.600,06	22.182.850.600,06
	Peralatan dan Mesin	36.133.431.193,14	36.125.431.193,14
	Gedung dan Bangunan	246.334.292.028,40	246.334.292.028,40
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	956.249.520,00	956.249.520,00
	Aset Tetap Lainnya	20.079.387.308,00	20.079.387.308,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	619.890.273,72	619.890.273,72
	Akumulasi Penyusutan	(69.802.704.716,01)	(64.975.815.555,93)
	Jumlah Aset Tetap	256.503.396.207,31	261.322.285.367,39



1.4	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran		
	Tuntutan Ganti Rugi		
	Tagihan Lainnya		
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
	Aset Tak Berwujud	297.303.500,00	297.303.500,00
	Amortisasi	(247.016.550,00)	(230.570.000,00)
	Aset Lain-lain	9.159.185.620,48	9.159.185.620,48
	Jumlah Aset Lainnya	9.209.472.570,48	9.225.919.120,48
	JUMLAH ASET	267.747.543.225,97	271.907.172.436,05
2	KEWAJIBAN		
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
	Pendapatan Diterima Dimuka		
	Utang Belanja	4.193.800,00	394.836.480,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya		
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	4.193.800,00	394.836.480,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	4.193.800,00	394.836.480,00
3.	EKUITAS	267.743.349.425,97	271.512.335.956,05
3.1.1.01	EKUITAS	(825.931.183.387,73)	(725.097.873.638,65)
3.1.3.01	RK-PPKD	1.093.674.532.813,70	996.610.209.594,70
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	267.747.543.225,97	271.907.172.436,05

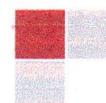
Pangkalan Bun,

2019

Pengguna Anggaran,



Ir. M. ROSIHAN PRIBADI, M.Si
NIP. 19650502 199102 1 002



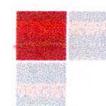
PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Sesuai dengan Peraturan Perundangan Bidang Pengelolaan Keuangan Negara yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan seiring dengan paradigma penyelenggaraan pemerintahan saat ini, Peraturan Negeri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik merupakan suatu tuntutan sehingga sudah menjadi komitmen bersama yang harus dibangun seluruh komponen pemerintahan agar pelayanan pada masyarakat dapat dioptimalkan. Untuk melaksanakannya, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang dipimpinnya.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah entitas akuntansi dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun laporan keuangan. Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 32 bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Disisi lain penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Mengingat terdapat perbedaan struktur akun belanja dari kedua peraturan tersebut maka dalam penyajian Laporan Keuangan dilakukan langkah konversi atau pemetaan sesuai Buletin Teknis Nomor 03 tentang

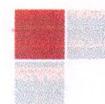


Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai SAP dengan konversi. Konversi dilakukan dengan cara mentransir kembali (*trace back*) pos-pos Laporan Keuangan.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan dan belanja. Berdasarkan laporan ini, realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019 adalah sebesar Rp0,00. Sementara itu, realisasi Belanja adalah sebesar Rp96.391.293.219,00 atau 31,09 persen dari yang dianggarkan dalam APBD TA. 2019.
2. Laporan Operasional memberikan informasi tentang Pendapatan LO dan Beban LO. Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Beban LO merupakan belanja atau beban yang sudah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan. Berdasarkan Laporan ini, total Pendapatan LO adalah sebesar Rp0,00 dan Beban LO adalah sebesar Rp100.833.220.749,08.
3. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan saldo akhir ekuitas adalah sebesar (Rp825.931.094.387,73).
4. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Semester I Tahun 2019. Dari Neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai Aset adalah sebesar Rp267.747.543.225,97 Kewajiban sebesar Rp4.913.800,00 sehingga Ekuitas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan per 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp267.743.349.425,97.
5. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca.

Kami menyadari bahwa laporan keuangan Semester I Tahun 2019 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan



menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2017;



16. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.



IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Kebijakan Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017-2021

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai visi dan misi sebagai berikut :

a. Visi

Gerakan Membangun Kotawaringin Barat Menuju Kejayaan dengan Kerja Nyata dan Ikhlas

b. Misi

1. Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan dan Olahraga
3. Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup
4. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat
5. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis
6. Melestraikan situs budaya, kesenian lokal dan masyarakat lainnya guna meningkatkan kunjungan wisata.

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat, mempunyai tugas pokok mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan kewenangan Pemerintahan Daerah dibidang Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

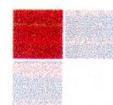
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :



- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijakan Operasional Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Mengkoordinasikan kebijakan Operasional dan program pendidikan dan kebudayaan;
- c. Merumuskan kebijakan strategi untuk Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Masyarakat sesuai dengan perencanaan strategis Pendidikan Nasional;
- d. Mengatur pelaksanaan standar nasional pendidikan tingkat Kabupaten;
- e. Mengkoordinasikan pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan untuk tingkat pendidikan dasar;
- f. Mengatur pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan dan atau program studi berstandar nasional pada jenjang pendidikan dasar;
- g. Memberikan petunjuk pengelolaan peremajaan data dan sistem informasi manajemen pendidikan untuk tingkat kabupaten;
- h. Mensosialisasikan kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar;
- i. Mensosialisasikan dan mengimplementasikan standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar;
- j. Mensosialisasikan dan memfasilitasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar;
- k. Melakukan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional bidang sarana dan prasarana pada pendidikan dasar;
- l. Melakukan pengawasan terhadap pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan;
- m. Melakukan pengawasan penggunaan buku pelajaran;
- n. Mengkoordinasikan perencanaan kebutuhan pendidikan dan tenaga kependidikan untuk pendidikan berstandar nasional sesuai kewenangan;



- o. Merumuskan pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan ASN untuk satuan pendidikan;
- p. Merumuskan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan;
- q. Meningkatkan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan bertaraf nasional;
- r. Melakukan pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan bertaraf nasional;
- s. Merumuskan pemberhentian ASN dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
- t. Melakukan pengalokasian tenaga potensial pendidik dan tenaga kependidikan didaerah;
- u. Melakukan pelaksanaan Ujian Nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama dan pendidikan non formal;
- v. Mengkoordinasikan pengumpulan data, analisis data perencanaan dibidang pendidikan;
- w. Merencanakan rencana kebijakan pendidikan dan kebudayaan;
- x. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

2.2 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat terlihat pada ringkasan realisasi fisik dan keuangan Semester I Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / BELANJA	ANGGARAN	REALISASI			KET
			FISIK	KEUANGAN		
			%	%	Rp.	
5.2	BELANJA LANGSUNG	93.533.347.000,00	32,43	28,09	26.276.980.581,00	
1.01.1.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.221.151.440,00	27,00	25,88	574.856.222,00	
1.01.1.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	351.840.000,00	50,00	25,68	90.341.114,00	
5.2.2.03.01	Belanja Telpon	25.200.000,00	50,00	16,67	4.200.000,00	
5.2.2.03.02	Belanja air	5.640.000,00	50,00	25,00	1.410.000,00	
5.2.2.03.03	Belanja listrik	236.400.000,00	50,00	30,89	73.021.114,00	
5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	8.400.000,00	50,00	30,48	2.560.000,00	
5.2.2.03.06	Belanja kawat/ faximile / internet	76.200.000,00	50,00	12,01	9.150.000,00	



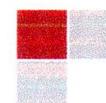
1.01.1.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	16.600.000,00	15,00	14,11	2.342.200,00
5.2.2.26.06	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor/Administrasi STNK/TNKB dan SWDKLLJ	16.600.000,00	15,00	14,11	2.342.200,00
1.01.1.01.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	652.302.000,00	43,17	23,55	153.617.390,00
5.2.1.01.05	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	33.750.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.01.06	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	34.950.000,00	50,00	0,00	0,00
5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	470.002.000,00	50,00	30,96	145.490.000,00
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	20.000.000,00	62,50	0,00	0,00
5.2.2.01.03	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	17.100.000,00	32,89	32,89	5.625.000,00
5.2.2.04.04	Belanja luran Jaminan Kesehatan Tenaga Kontrak	65.000.000,00	50,00	0,00	0,00
5.2.2.04.05	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja Tenaga Kontrak	5.000.000,00	50,00	22,24	1.112.172,00
5.2.2.04.06	Belanja luran Jaminan Kematian Tenaga Kontrak	6.500.000,00	50,00	21,39	1.390.218,00
1.01.1.01.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	183.639.000,00	40,00	35,42	65.042.700,00
5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	140.439.000,00	50,00	43,32	60.842.700,00
5.2.2.01.04	Belanja bahan pembersih	37.200.000,00	12,00	11,29	4.200.000,00
5.2.2.02.07	Belanja Pupuk	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.47.27	Belanja Peralatan Kebersihan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.01.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	62.370.000,00	12,00	5,89	3.675.000,00
5.2.2.28.01	Belanja pemeliharaan mesin tik	750.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.29.14	Belanja pemeliharaan komputer Desktop	23.360.000,00	0,00	3,64	850.000,00
5.2.2.29.15	Belanja pemeliharaan komputer laptop/ notebook	18.250.000,00	25,00	7,40	1.350.000,00
5.2.2.29.16	Belanja pemeliharaan printer	20.010.000,00	25,00	7,37	1.475.000,00
1.01.1.01.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	154.740.440,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	154.740.440,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	155.300.000,00	25,00	7,78	12.075.000,00
5.2.2.06.01	Belanja cetak	42.800.000,00	25,00	9,81	4.200.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	112.500.000,00	25,00	7,00	7.875.000,00
1.01.1.01.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27.000.000,00	0,00	11,67	3.150.000,00
5.2.2.01.02	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	27.000.000,00	12,00	11,67	3.150.000,00
1.01.1.01.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	124.000.000,00	20,00	0,00	0,00
5.2.3.12.02	Belanja modal Pengadaan komputer desktop	60.000.000,00	20,00	0,00	0,00
5.2.3.12.03	Belanja modal Pengadaan komputer laptop/notebook	24.000.000,00	20,00	0,00	0,00
5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan printer	40.000.000,00	20,00	0,00	0,00
1.01.1.01.01.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.000.000,00	100,00	100,00	8.000.000,00
5.2.3.14.04	Belanja modal Pengadaan kulkas	8.000.000,00	100,00	100,00	8.000.000,00
1.01.1.01.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	43.925.000,00	10,00	6,29	2.765.000,00
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	43.925.000,00	10,00	6,29	2.765.000,00
1.01.1.01.01.01.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	436.835.000,00	75,00	53,53	233.847.818,00



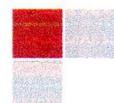
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar kota	436.835.000,00	75,00	53,53	233.847.818,00
1.01.1.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.002.486.000,00	3,64	0,01	22.884.332,00
1.01.1.01.01.02.03	Pembangunan Gedung Kantor	2.279.800.000,00	0,00	0	0,00
5.2.3.24.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	2.279.800.000,00	0,00	0	0,00
1.01.1.01.01.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	165.500.000,00	0,00	0	0,00
5.2.3.11.07	Belanja modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	75.000.000,00	0,00	0	0,00
5.2.3.11.11	Belanja modal Pengadaan mesin pompa air	7.000.000,00	0,00	0	0,00
5.2.3.11.14	Belanja modal Pengadaan tenda	48.000.000,00	0,00	0	0,00
5.2.3.11.18	Belanja modal Pengadaan papan nama	2.500.000,00	0,00	0	0,00
5.2.3.11.22	Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran	3.000.000,00	0,00	0	0,00
5.2.3.15.03	Belanja modal Pengadaan proyektor	30.000.000,00	0,00	0	0,00
1.01.1.01.01.02.10	Pengadaan Meubelair	145.000.000,00	0,00	0	0,00
5.2.3.11.02	Belanja modal Pengadaan almari	30.000.000,00	0,00	0	0,00
5.2.3.13.02	Belanja modal Pengadaan meja rapat	75.000.000,00	0,00	0	0,00
5.2.3.13.06	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	40.000.000,00	0,00	0	0,00
1.01.1.01.01.02.13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	186.676.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.42.01	Belanja pemeliharaan gedung/bangunan kantor	186.676.000,00	0,00	0	0,00
1.01.1.01.01.02.15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	172.250.000,00	20,00	12,82	22.084.332,00
5.2.2.26.01	Belanja Jasa Service	30.600.000,00	20,00	13,56	4.150.000,00
5.2.2.26.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	65.900.000,00	20,00	18,55	12.225.000,00
5.2.2.26.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	75.750.000,00	20,00	7,54	5.709.332,00
1.01.1.01.01.02.17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	15.960.000,00	5,50	5,01	800.000,00
5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	12.000.000,00	7,00	6,67	800.000,00
5.2.2.29.10	Belanja pemeliharaan generator set	3.360.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.29.11	Belanja pemeliharaan mesin pompa air	600.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.01.02.19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	37.300.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.29.07	Belanja pemeliharaan Air Conditioner (AC)	18.300.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.29.08	Belanja pemeliharaan kipas angin	2.000.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.29.12	Belanja pemeliharaan CCTV	5.000.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.32.03	Belanja pemeliharaan proyektor	6.000.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.32.05	Belanja pemeliharaan sound system	6.000.000,00	0,00	0	0,00
1.01.1.01.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	236.950.000,00	0,00	0	0,00
1.01.1.01.01.03.01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	16.000.000,00	0,00	0	0,00
5.2.3.10.11	Belanja modal Pengadaan Mesin Absensi	16.000.000,00	0,00	0	0,00
1.01.1.01.01.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	123.450.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	117.600.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.12.08	Belanja Perpanjangan Kartu Tanda Anggota	5.850.000,00	0,00	0	0,00



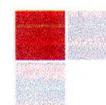
1.01.1.01.01.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	97.500.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	97.500.000,00	0,00	0	0,00
1.01.1.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	445.952.500,00	32,98	24,44	109.009.317,00
1.01.1.01.01.05.02	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	237.312.500,00	0,00	0	0,00
5.2.2.01.08	Belanja bahan pelatihan / sosialisasi	18.000.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.200.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	7.500.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Pelatihan / Sosialisasi	43.312.500,00	0,00	0	0,00
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam kota	63.750.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar kota	40.000.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.20.12	Belanja Transportasi/Akomodasi Pihak Ketiga	22.150.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.21.01	Honorarium tenaga ahli	20.000.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.21.02	Honorarium instruktur/narasumber	13.900.000,00	0,00	0	0,00
1.01.1.01.01.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	208.640.000,00	65,95	52,25	109.009.317,00
5.2.2.01.08	Belanja bahan pelatihan / sosialisasi	1.440.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.06.01	Belanja cetak	600.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	900.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	5.000.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Pelatihan / Sosialisasi	8.250.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam kota	8.800.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar kota	86.000.000,00	80,00	77,34	66.509.317,00
5.2.2.19.03	Belanja bimbingan teknis	86.000.000,00	80,00	49,42	42.500.000,00
5.2.2.20.12	Belanja Transportasi/Akomodasi Pihak Ketiga	5.000.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.21.02	Honorarium instruktur/narasumber	6.650.000,00	0,00	0	0,00
1.01.1.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	67.850.000,00	50,00	49,76	33.762.500,00
1.01.1.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.725.000,00	50,00	0	0,00
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.000.000,00	100,00	0	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.725.000,00	50,00	0	0,00
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar kota	10.000.000,00	0,00	0	0,00
1.01.1.01.01.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	3.300.000,00	0,00	0	0,00
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.700.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	0,00	0	0,00
1.01.1.01.01.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	50.825.000,00	100,00	66,43	33.762.500,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.825.000,00	100,00	0	0,00
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar kota	44.000.000,00	100,00	76,73	33.762.500,00



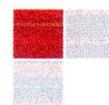
1.01.1.01.01.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	3.495.276.500,00	10,10	3,09	107.835.000,00
1.01.1.01.01.15.01	Pembangunan Gedung Sekolah	738.120.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.23.02	Belanja Barang/Jasa yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga	299.620.000,00	0,00	0	0,00
5.2.3.24.08	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung sekolah	438.500.000,00	0,00	0	0,00
1.01.1.01.01.15.03	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	715.439.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.23.02	Belanja Barang/Jasa yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga	149.810.000,00	0,00	0	0,00
5.2.3.24.08	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung sekolah	565.629.000,00	0,00	0	0,00
1.01.1.01.01.15.07	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary	225.500.000,00	0,00	0	0,00
5.2.3.24.08	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung sekolah	225.500.000,00	0,00	0	0,00
1.01.1.01.01.15.08	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	420.000.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.23.02	Belanja Barang/Jasa yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga	300.000.000,00	0,00	0	0,00
5.2.3.18.11	Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik Pendidikan	120.000.000,00	0,00	0	0,00
1.01.1.01.01.15.09	Pengadaan Mebeluer Sekolah	218.737.500,00	0,00	0	0,00
5.2.2.23.02	Belanja Barang/Jasa yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga	83.837.500,00	0,00	0	0,00
5.2.3.11.02	Belanja modal Pengadaan almari	5.200.000,00	0,00	0	0,00
5.2.3.11.13	Belanja Modal Pengadaan Papan Tulis	1.800.000,00	0,00	0	0,00
5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan Meja Sekolah	74.800.000,00	0,00	0	0,00
5.2.3.13.08	Belanja modal Pengadaan kursi sekolah	53.100.000,00	0,00	0	0,00
1.01.1.01.01.15.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah	200.112.500,00	0,00	0	0,00
5.2.2.23.02	Belanja Barang/Jasa yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga	200.112.500,00	0,00	0	0,00
1.01.1.01.01.15.15	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	54.075.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.06.01	Belanja cetak	6.000.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Pelatihan / Sosialisasi	13.000.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam kota	15.375.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar kota	4.100.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.21.02	Honorarium instruktur/narasumber	15.600.000,00	0,00	0	0,00
1.01.1.01.01.15.18	Pengembangan Data dan Informasi Pendidikan Anak Usia Dini	46.925.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.01.08	Belanja bahan pelatihan / sosialisasi	6.035.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.06.01	Belanja cetak	640.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.500.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Pelatihan / Sosialisasi	11.700.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam kota	14.450.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.20.12	Belanja Transportasi/Akomodasi Pihak Ketiga	3.300.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.21.02	Honorarium instruktur/narasumber	6.800.000,00	0,00	0	0,00
1.01.1.01.01.15.19	Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini	134.965.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.01.08	Belanja bahan pelatihan / sosialisasi	17.715.000,00	0,00	0	0,00



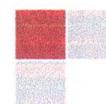
5.2.2.06.01	Belanja cetak	3.700.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.400.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	4.500.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	4.500.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Pelatihan / Sosialisasi	35.100.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam kota	45.900.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.21.02	Honorarium instruktur/narasumber	18.150.000,00	0,00	0	0,00
1.01.1.01.01.15.20	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang PAUD Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara PAUD	554.102.500,00	19,64	6,13	33.975.000,00
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	18.600.000,00	50,00	50,00	9.300.000,00
5.2.2.01.02	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	4.000.000,00	50,00	50,00	2.000.000,00
5.2.2.01.08	Belanja bahan pelatihan / sosialisasi	130.050.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.01.12	Balanja bahan baku pendidikan	208.200.000,00	5,00	3,17	6.600.000,00
5.2.2.03.01	Belanja Telpon	800.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.03.02	Belanja air	2.400.000,00	50,00	50,00	1.200.000,00
5.2.2.03.03	Belanja listrik	12.000.000,00	50,00	50,00	6.000.000,00
5.2.2.06.01	Belanja cetak	5.100.000,00	44,12	44,12	2.250.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	13.800.000,00	34,78	34,78	4.800.000,00
5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Pelatihan / Sosialisasi	17.377.500,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam kota	25.925.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.21.02	Honorarium instruktur/narasumber	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.23.02	Belanja Barang/Jasa yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.29.14	Belanja pemeliharaan komputer Desktop	3.650.000,00	50,00	50,00	1.825.000,00
5.2.3.25.29	Belanja modal Pengadaan buku bahan perpustakaan	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.01.15.21	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	93.800.000,00	80,00	78,74	73.860.000,00
5.2.2.01.09	Belanja bahan perlombaan	6.375.000,00	100,00	100,00	6.375.000,00
5.2.2.01.14	Belanja tropy, hadiah, plakat dan cinderamata	11.100.000,00	100,00	100,00	11.100.000,00
5.2.2.06.01	Belanja cetak	3.300.000,00	100,00	100,00	3.300.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	900.000,00	100,00	100,00	900.000,00
5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	5.000.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.10.07	Belanja sewa sound system	6.000.000,00	100,00	100,00	6.000.000,00
5.2.2.11.08	Belanja makanan dan minuman operasional	18.375.000,00	100,00	100,00	18.375.000,00
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam kota	28.900.000,00	0,00	0	14.960.000,00
5.2.2.21.01	Honorarium tenaga ahli	6.250.000,00	100,00	84,00	5.250.000,00
5.2.2.22.02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	7.600.000,00	100,00	100,00	7.600.000,00
1.01.1.01.01.15.22	Penyelenggaraan Akreditasi Jenjang PAUD	52.900.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.01.08	Belanja bahan pelatihan / sosialisasi	2.400.000,00	0,00	0	0,00



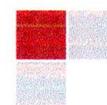
5.2.2.06.01	Belanja cetak	600.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.500.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Pelatihan / Sosialisasi	8.400.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam kota	8.500.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar kota	25.000.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.21.02	Honorarium instruktur/narasumber	3.400.000,00	0,00	0	0,00
1.01.1.01.01.15.23	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	40.600.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	40.600.000,00	0,00	0	0,00
1.01.1.01.01.16	Program Pendidikan Sekolah Dasar	43.713.615.844,00	42,47	35,47	15.503.706.950,00
1.01.1.01.01.16.01	Pembangunan Gedung Sekolah	2.327.430.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.23.02	Belanja Barang/Jasa yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga	149.810.000,00	0,00	0	0,00
5.2.3.24.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	385.500.000,00	0,00	0	0,00
5.2.3.24.08	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung sekolah	1.412.320.000,00	0,00	0	0,00
5.2.3.24.27	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian pagar	379.800.000,00	0,00	0	0,00
1.01.1.01.01.16.02	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	2.586.100.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.42.03	Belanja pemeliharaan gedung/bangunan rumah dinas	126.600.000,00	0,00	0	0,00
5.2.3.24.03	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah dinas	2.459.500.000,00	0,00	0	0,00
1.01.1.01.01.16.03	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	5.375.811.058,00	0,00	0	0,00
5.2.2.23.02	Belanja Barang/Jasa yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga	149.810.000,00	0,00	0	0,00
5.2.3.24.08	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung sekolah	5.226.001.058,00	0,00	0	0,00
1.01.1.01.01.16.04	Penambahan Ruang Guru Sekolah	464.800.000,00	0,00	0	0,00
5.2.3.24.08	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung sekolah	464.800.000,00	0,00	0	0,00
1.01.1.01.01.16.05	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir	514.300.000,00	0,00	0	0,00
5.2.3.24.08	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung sekolah	514.300.000,00	0,00	0	0,00
1.01.1.01.01.16.06	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.653.400.000,00	0,00	0	0,00
5.2.3.24.08	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung sekolah	1.653.400.000,00	0,00	0	0,00
1.01.1.01.01.16.07	Pembangunan Jaringan Instalasi Listrik Sekolah dan Perlengkapannya	90.000.000,00	0,00	0	0,00
5.2.3.24.08	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung sekolah	90.000.000,00	0,00	0	0,00
1.01.1.01.01.16.08	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary	1.689.802.440,00	0,00	0	0,00
5.2.3.24.08	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung sekolah	1.689.802.440,00	0,00	0	0,00
1.01.1.01.01.16.09	Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah	2.590.000.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	740.000.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.14.06	Belanja pakaian seragam	1.850.000.000,00	0,00	0	0,00
1.01.1.01.01.16.10	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	400.000.000,00	0,00	0	0,00
5.2.3.12.02	Belanja modal Pengadaan komputer desktop	400.000.000,00	0,00	0	0,00
1.01.1.01.01.16.11	Pengadaan Mebeluer Sekolah	540.000.000,00	0,00	0	0,00



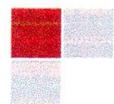
5.2.2.30.04	Belanja pemeliharaan meja sekolah	67.500.000,00	0,00	0	0,00
5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan Meja Sekolah	472.500.000,00	0,00	0	0,00
1.01.1.01.01.16.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah	1.443.468.496,00	0,00	0	0,00
5.2.3.24.08	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung sekolah	1.443.468.496,00	0,00	0	0,00
1.01.1.01.01.16.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	1.658.500.000,00	0,00	0	0,00
5.2.3.24.03	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah dinas	1.658.500.000,00	0,00	0	0,00
1.01.1.01.01.16.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	9.090.248.350,00	0,00	0	0,00
5.2.3.24.08	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung sekolah	9.090.248.350,00	0,00	0	0,00
1.01.1.01.01.16.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	226.700.000,00	0,00	0	0,00
5.2.3.24.08	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung sekolah	226.700.000,00	0,00	0	0,00
1.01.1.01.01.16.17	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB Serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD	3.951.050.500,00	13,01	6,40	252.990.500,00
5.2.1.02.04	Upah Kerja	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.04.03	Belanja Pegawai Dana BOS	2.616.000.000,00	41,67	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	300.600.000,00	21,71	21,71	65.250.000,00
5.2.2.01.02	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	133.600.000,00	21,71	21,71	29.000.000,00
5.2.2.01.08	Belanja bahan pelatihan / sosialisasi	16.215.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.01.12	Balanja bahan baku pendidikan	334.000.000,00	21,71	21,71	72.500.000,00
5.2.2.03.03	Belanja listrik	172.800.000,00	19,79	19,79	34.200.000,00
5.2.2.06.01	Belanja cetak	118.700.000,00	21,38	21,38	25.375.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	125.995.500,00	21,16	21,16	26.665.500,00
5.2.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Pelatihan / Sosialisasi	33.600.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam kota	47.940.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar kota	39.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.21.02	Honorarium instruktur/narasumber	11.400.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.01.16.18	Penyediaan Buku Pelajaran Untuk SD/MI/SDLB	6.800.000.000,00	0,00	0	0,00
5.2.3.25.29	Belanja modal Pengadaan buku bahan perpustakaan	6.800.000.000,00	0,00	0	0,00
1.01.1.01.01.16.19	Pembinaan Kelembagaan Sekolah dan Manajemen Sekolah Dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Jenjang Sekolah Dasar	169.040.000,00	0,00	0	0,00
5.2.1.02.04	Upah Kerja	1.200.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.01.08	Belanja bahan pelatihan / sosialisasi	5.440.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.800.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Pelatihan / Sosialisasi	26.040.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam kota	31.960.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar kota	72.000.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.21.02	Honorarium instruktur/narasumber	27.600.000,00	0,00	0	0,00
1.01.1.01.01.16.20	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	875.000.000,00	49,20	18,04	157.853.800,00



5.2.1.02.04	Upah Kerja	383.067.500,00	0,20	0,20	750.000,00
5.2.2.01.08	Belanja bahan pelatihan / sosialisasi	6.000.000,00	50,00	49,40	2.964.000,00
5.2.2.01.09	Belanja bahan perlombaan	8.000.000,00	36,88	36,88	2.950.000,00
5.2.2.01.14	Belanja trophy, hadiah, plakat dan cinderamata	12.600.000,00	100,00	100,00	12.600.000,00
5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	500.000,00	100,00	100,00	500.000,00
5.2.2.06.01	Belanja cetak	8.280.000,00	36,59	36,59	3.030.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.550.000,00	27,00	26,90	2.299.800,00
5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	25.000.000,00	25,00	24,60	6.150.000,00
5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	8.800.000,00	20,00	18,18	1.600.000,00
5.2.2.10.07	Belanja sewa sound system	1.500.000,00	100,00	100,00	1.500.000,00
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.500.000,00	43,67	43,67	4.585.000,00
5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman penambah daya tahan tubuh	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.11.08	Belanja makanan dan minuman operasional	149.712.500,00	25,00	23,75	35.560.000,00
5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	24.000.000,00	37,50	37,50	9.000.000,00
5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	21.000.000,00	37,86	37,86	7.950.000,00
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam kota	23.890.000,00	90,00	87,88	20.995.000,00
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar kota	113.800.000,00	10,00	8,01	9.120.000,00
5.2.2.21.01	Honorarium tenaga ahli	46.250.000,00	45,95	45,95	21.250.000,00
5.2.2.22.02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	15.050.000,00	100,00	100,00	15.050.000,00
1.01.1.01.01.16.21	Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar	119.130.000,00	0,00	0	0,00
5.2.1.02.04	Upah Kerja	1.200.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.01.08	Belanja bahan pelatihan / sosialisasi	10.880.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.800.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Pelatihan / Sosialisasi	22.890.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam kota	31.960.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar kota	39.000.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.21.02	Honorarium instruktur/narasumber	9.900.000,00	0,00	0	0,00
1.01.1.01.01.16.22	Penyediaan Beasiswa Prestasi	335.000.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar kota	15.000.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.22.02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	320.000.000,00	0,00	0	0,00
1.01.1.01.01.16.23	Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar	35.875.000,00	25,07	25,07	8.995.000,00
5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	900.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.200.000,00	25,00	25,00	300.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.200.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.400.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Pelatihan / Sosialisasi	3.675.000,00	100,00	100,00	3.675.000,00
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam kota	6.500.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar kota	10.000.000,00	0,00	0	0,00



5.2.2.20.12	Belanja Transportasi/Akomodasi Pihak Ketiga	1.700.000,00	42,35	42,35	720.000,00
5.2.2.21.02	Honorarium instruktur/narasumber	6.300.000,00	68,25	68,25	4.300.000,00
1.01.1.01.01.16.24	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	777.960.000,00	50,00	47,62	370.427.650,00
5.2.2.01.08	Belanja bahan pelatihan / sosialisasi	351.940.000,00	51,51	51,51	181.280.150,00
5.2.2.06.01	Belanja cetak	80.700.000,00	1,00	0,74	600.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	109.500.000,00	100,00	99,10	108.510.000,00
5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	45.000.000,00	70,00	67,56	30.400.000,00
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	27.300.000,00	55,00	53,46	14.595.000,00
5.2.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Pelatihan / Sosialisasi	15.120.000,00	85,00	82,29	12.442.500,00
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam kota	20.250.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar kota	76.000.000,00	30,00	29,21	22.200.000,00
5.2.2.21.01	Honorarium tenaga ahli	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.21.02	Honorarium instruktur/narasumber	49.150.000,00	1,00	0,81	400.000,00
1.01.1.01.01.17	Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	27.583.185.500,00	35,00	29,84	8.230.443.000,00
1.01.1.01.01.17.01	Pembangunan Gedung Sekolah	1.633.255.000,00	0,00	0	0,00
5.2.3.24.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	619.560.000,00	0,00	0	0,00
5.2.3.24.08	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung sekolah	1.013.695.000,00	0,00	0	0,00
1.01.1.01.01.17.02	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	1.145.300.000,00	0,00	0	0,00
5.2.3.24.03	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah dinas	897.400.000,00	0,00	0	0,00
5.2.3.24.08	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung sekolah	247.900.000,00	0,00	0	0,00
1.01.1.01.01.17.03	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	1.171.400.000,00	0,00	0	0,00
5.2.3.24.08	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung sekolah	1.171.400.000,00	0,00	0	0,00
1.01.1.01.01.17.04	Penambahan Ruang Guru Sekolah	607.600.000,00	0,00	0	0,00
5.2.3.24.08	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung sekolah	607.600.000,00	0,00	0	0,00
1.01.1.01.01.17.05	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir	766.485.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.23.02	Belanja Barang/Jasa yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga	100.225.000,00	0,00	0	0,00
5.2.3.24.08	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung sekolah	666.260.000,00	0,00	0	0,00
1.01.1.01.01.17.06	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	2.040.000.000,00	0,00	0	0,00
5.2.3.24.08	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung sekolah	2.040.000.000,00	0,00	0	0,00
1.01.1.01.01.17.07	Pembangunan Jaringan Instalasi Listrik Sekolah dan Perlengkapannya	120.000.000,00	0,00	0	0,00
5.2.3.23.01	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik	120.000.000,00	0,00	0	0,00
1.01.1.01.01.17.08	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary	221.000.000,00	0,00	0	0,00
5.2.3.24.08	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung sekolah	221.000.000,00	0,00	0	0,00
1.01.1.01.01.17.09	Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah	2.719.240.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.23.02	Belanja Barang/Jasa yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga	184.500.000,00	0,00	0	0,00
5.2.3.24.08	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung sekolah	2.534.740.000,00	0,00	0	0,00
1.01.1.01.01.17.10	Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siwa	225.000.000,00	0,00	0	0,00



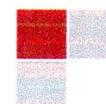
5.2.3.25.29	Belanja modal Pengadaan buku bahan perpustakaan	225.000.000,00	0,00	0	0,00
1.01.1.01.01.17.11	Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah	1.620.000.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	540.000.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.14.06	Belanja pakaian seragam	1.080.000.000,00	0,00	0	0,00
1.01.1.01.01.17.18	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	2.100.000.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.23.02	Belanja Barang/Jasa yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga	180.000.000,00	0,00	0	0,00
5.2.3.12.02	Belanja modal Pengadaan komputer desktop	1.920.000.000,00	0,00	0	0,00
1.01.1.01.01.17.19	Pengadaan Mebeluer Sekolah	894.910.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.23.02	Belanja Barang/Jasa yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga	101.800.000,00	0,00	0	0,00
5.2.3.11.02	Belanja modal Pengadaan almari	81.360.000,00	0,00	0	0,00
5.2.3.11.13	Belanja Modal Pengadaan Papan Tulis	10.200.000,00	0,00	0	0,00
5.2.3.13.01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	76.800.000,00	0,00	0	0,00
5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan Meja Sekolah	333.000.000,00	0,00	0	0,00
5.2.3.13.05	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	50.550.000,00	0,00	0	0,00
5.2.3.13.08	Belanja modal Pengadaan kursi sekolah	241.200.000,00	0,00	0	0,00
1.01.1.01.01.17.20	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah	956.780.000,00	0,00	0	0,00
5.2.3.24.08	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung sekolah	956.780.000,00	0,00	0	0,00
1.01.1.01.01.17.21	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	279.500.000,00	0,00	0	0,00
5.2.3.24.08	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung sekolah	279.500.000,00	0,00	0	0,00
1.01.1.01.01.17.22	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.570.588.000,00	0,00	0	0,00
5.2.3.24.08	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung sekolah	2.570.588.000,00	0,00	0	0,00
1.01.1.01.01.17.23	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	300.000.000,00	0,00	0	0,00
5.2.3.24.08	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung sekolah	300.000.000,00	0,00	0	0,00
1.01.1.01.01.17.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium dan Praktikum Sekolah	1.195.900.000,00	0,00	0	0,00
5.2.3.24.08	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung sekolah	1.195.900.000,00	0,00	0	0,00
1.01.1.01.01.17.25	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	836.560.000,00	0,00	0	0,00
5.2.3.24.08	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung sekolah	836.560.000,00	0,00	0	0,00
1.01.1.01.01.17.26	Pelatihan Penyusunan Kurikulum	81.580.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.01.08	Belanja bahan pelatihan / sosialisasi	3.780.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.06.01	Belanja cetak	600.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	19.500.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	5.000.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	750.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Pelatihan / Sosialisasi	23.800.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam kota	12.750.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.20.12	Belanja Transportasi/Akomodasi Pihak Ketiga	3.700.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.21.02	Honorarium instruktur/narasumber	10.200.000,00	0,00	0	0,00



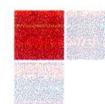
1.01.1.01.01.17.27	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP/Mts Serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SMP	4.587.487.500,00	37,94	24,58	1.127.385.000,00
5.2.1.04.03	Belanja Pegawai Dana BOS	1.308.000.000,00	25,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	347.400.000,00	41,58	41,58	144.450.000,00
5.2.2.01.08	Belanja bahan pelatihan / sosialisasi	1.653.600.000,00	38,64	38,64	638.880.000,00
5.2.2.01.12	Belanja bahan baku pendidikan	532.200.000,00	42,14	42,14	224.250.000,00
5.2.2.03.01	Belanja Telpon	30.000.000,00	44,17	44,17	13.250.000,00
5.2.2.03.02	Belanja air	1.400.000,00	50,00	50,00	700.000,00
5.2.2.03.03	Belanja listrik	71.400.000,00	43,77	43,77	31.250.000,00
5.2.2.06.01	Belanja cetak	78.300.000,00	24,81	24,81	19.425.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	77.500.000,00	24,52	24,52	19.000.000,00
5.2.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Pelatihan / Sosialisasi	7.087.500,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam kota	10.200.000,00	90,00	90,00	9.180.000,00
5.2.2.21.02	Honorarium instruktur/narasumber	2.800.000,00	64,29	64,29	1.800.000,00
5.2.2.23.02	Belanja Barang/Jasa yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga	408.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.47.25	Belanja Alat Listrik dan elektronik	59.600.000,00	42,28	42,28	25.200.000,00
1.01.1.01.01.17.29	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	589.700.000,00	39,02	26,38	155.574.500,00
5.2.1.02.04	Upah Kerja	1.200.000,00	75,00	75,00	900.000,00
5.2.2.01.08	Belanja bahan pelatihan / sosialisasi	6.000.000,00	81,03	81,03	4.862.000,00
5.2.2.01.09	Belanja bahan perlombaan	12.000.000,00	25,00	23,83	2.860.000,00
5.2.2.01.14	Belanja trophy, hadiah, plakat dan cinderamata	7.800.000,00	100,00	92,31	7.200.000,00
5.2.2.01.18	Belanja obat-obatan	1.150.000,00	45,00	43,48	500.000,00
5.2.2.03.18	Belanja jasa dokumentasi	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.06.01	Belanja cetak	5.000.000,00	75,00	74,50	3.725.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	14.250.000,00	80,00	78,95	11.250.000,00
5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	65.250.000,00	4,60	4,60	3.000.000,00
5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	58.800.000,00	6,12	6,12	3.600.000,00
5.2.2.10.07	Belanja sewa sound system	4.500.000,00	44,44	44,44	2.000.000,00
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.000.000,00	58,25	58,25	4.077.500,00
5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan	90.450.000,00	44,58	44,58	40.320.000,00
5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman penambah daya tahan tubuh	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	11.250.000,00	88,00	88,00	9.900.000,00
5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	34.500.000,00	15,22	15,22	5.250.000,00
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam kota	91.200.000,00	51,84	51,84	47.280.000,00
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar kota	134.250.000,00	3,02	3,02	4.050.000,00
5.2.2.21.01	Honorarium tenaga ahli	21.500.000,00	22,33	22,33	4.800.000,00
1.01.1.01.01.17.30	Penyebarnya dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar	36.900.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.01.08	Belanja bahan pelatihan / sosialisasi	3.600.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.06.01	Belanja cetak	300.000,00	0,00	0	0,00



5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.500.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Pelatihan / Sosialisasi	12.250.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam kota	12.750.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.21.02	Honorarium instruktur/narasumber	2.800.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.21.03	Honorarium pembawa acara	250.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.21.04	Honorarium moderator	350.000,00	0,00	0	0,00
1.01.1.01.01.17.31	Penyediaan Beasiswa Prestasi	320.000.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.22.02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	320.000.000,00	0,00	0	0,00
1.01.1.01.01.17.33	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	564.000.000,00	86,82	86,82	489.683.500,00
5.2.2.01.08	Belanja bahan pelatihan / sosialisasi	450.000.000,00	100,00	99,87	449.413.500,00
5.2.2.06.01	Belanja cetak	900.000,00	100,00	100,00	900.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.11.08	Belanja makanan dan minuman operasional	16.800.000,00			3.570.000,00
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar kota	81.000.000,00	40,00	37,90	30.700.000,00
5.2.2.21.01	Honorarium tenaga ahli	5.100.000,00	100,00	100,00	5.100.000,00
1.01.1.01.01.18	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	4.983.494.995,00	22,40	24,29	1.210.330.500,00
1.01.1.01.01.18.01	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	56.799.995,00	0,00	0	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.400.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.400.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar kota	39.999.995,00	0,00	0	0,00
1.01.1.01.01.18.03	Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi	360.000.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.19.03	Belanja bimbingan teknis	360.000.000,00	0,00	0	0,00
1.01.1.01.01.18.04	Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)	238.027.500,00	15,26	14,93	35.530.000,00
5.2.1.02.04	Upah Kerja	750.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.06.01	Belanja cetak	7.710.000,00	25,00	21,14	1.630.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.750.000,00	20,00	20,00	1.350.000,00
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	63.262.500,00	52,00	51,45	32.550.000,00
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar kota	126.555.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.21.02	Honorarium instruktur/narasumber	33.000.000,00	0,00	0	0,00
1.01.1.01.01.18.05	Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	317.777.500,00	3,00	2,80	8.900.000,00
5.2.1.02.04	Upah Kerja	1.500.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.01.08	Belanja bahan pelatihan / sosialisasi	30.960.000,00	30,00	28,75	8.900.000,00
5.2.2.01.14	Belanja tropy, hadiah, plakat dan cinderamata	1.845.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.06.01	Belanja cetak	5.800.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.750.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	44.650.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.10.07	Belanja sewa sound system	2.000.000,00	0,00	0	0,00



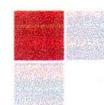
5.2.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Pelatihan / Sosialisasi	69.580.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam kota	2.550.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar kota	112.285.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.20.12	Belanja Transportasi/Akomodasi Pihak Ketiga	1.207.500,00			
5.2.2.21.02	Honorarium instruktur/narasumber	27.050.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.21.03	Honorarium pembawa acara	300.000,00			
5.2.2.21.04	Honorarium moderator	350.000,00			
5.2.2.22.02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	7.950.000,00	0,00	0	0,00
1.01.1.01.01.18.06	Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik	3.902.290.000,00	39,00	29,58	1.154.240.900,00
5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	1.319.825.000,00	41,67	41,01	541.240.900,00
5.2.1.02.04	Upah Kerja	2.239.200.000,00	41,67	27,38	613.000.000,00
5.2.2.01.14	Belanja tropy, hadiah, plakat dan cinderamata	130.000.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.06.01	Belanja cetak	2.790.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.500.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	13.300.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Pelatihan / Sosialisasi	6.300.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	7.500.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam kota	82.875.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar kota	90.000.000,00	0,00	0	0,00
1.01.1.01.01.18.07	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	108.600.000,00	11,00	10,74	11.659.600,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar kota	106.500.000,00	12,00	10,95	11.659.600,00
1.01.1.01.01.19	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	503.485.521,00	3,90	3,22	16.220.760,00
1.01.1.01.01.19.01	Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan	191.185.000,00	9,50	8,48	16.220.760,00
5.2.1.02.04	Upah Kerja	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.01.08	Belanja bahan pelatihan / sosialisasi	6.035.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.350.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	19.250.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam kota	21.250.000,00	80,00	0,00	0,00
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar kota	119.000.000,00	15,00	13,63	16.220.760,00
5.2.2.21.02	Honorarium instruktur/narasumber	14.700.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.21.03	Honorarium pembawa acara	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.21.04	Honorarium moderator	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.01.19.02	Pelaksanaan Kerjasama Secara Kelembagaan Di Bidang Pendidikan	158.560.000,00	0,00	0	0,00
5.2.1.02.04	Upah Kerja	1.400.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	14.960.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.01.09	Belanja bahan perlombaan	4.000.000,00	0,00	0	0,00



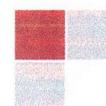
5.2.2.06.01	Belanja cetak	3.925.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.850.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	12.950.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Pelatihan / Sosialisasi	42.000.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam kota	11.625.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar kota	25.200.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.20.12	Belanja Transportasi/Akomodasi Pihak Ketiga	1.800.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.21.01	Honorarium tenaga ahli	8.000.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.21.02	Honorarium instruktur/narasumber	15.150.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.21.03	Honorarium pembawa acara	1.000.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.21.04	Honorarium moderator	1.400.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.22.02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	6.300.000,00	0,00	0	0,00
1.01.1.01.01.19.03	Pembinaan Dewan Pendidikan	67.210.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	67.210.000,00	0,00	0	0,00
1.01.1.01.01.19.04	Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan	58.800.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar kota	21.000.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.29.21	Belanja pemeliharaan jaringan komputer	7.200.000,00	0,00	0	0,00
5.2.3.12.01	Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server	21.000.000,00	0,00	0	0,00
5.2.3.12.11	Belanja Modal Pengadaan access points	4.600.000,00	0,00	0	0,00
5.2.3.32.12	Belanja modal Pengadaan/Pengembangan Website	5.000.000,00	0,00	0	0,00
1.01.1.01.01.19.05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	27.730.521,00	0,00	0	0,00
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar kota	27.730.521,00	0,00	0	0,00
1.01.1.01.01.20	Program Pendidikan Non Formal	1.859.354.000,00	6,00	5,70	106.029.000,00
1.01.1.01.01.20.01	Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal	145.100.000,00	40,00	39,48	57.279.000,00
5.2.2.01.08	Belanja bahan pelatihan / sosialisasi	123.200.000,00	50,00	46,49	57.279.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	900.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar kota	21.000.000,00	0,00	0	0,00
1.01.1.01.01.20.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal	1.533.554.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.01.08	Belanja bahan pelatihan / sosialisasi	50.000.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.23.02	Belanja Barang/Jasa yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga	120.900.000,00	0,00	0	0,00
5.2.3.18.11	Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik Pendidikan	150.000.000,00	0,00	0	0,00
5.2.3.24.08	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung sekolah	1.212.654.000,00	0,00	0	0,00
1.01.1.01.01.20.03	Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal	180.700.000,00	28,20	26,98	48.750.000,00
5.2.1.02.04	Upah Kerja	7.500.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.01.08	Belanja bahan pelatihan / sosialisasi	25.000.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.01.14	Belanja tropy, hadiah, plakat dan cinderamata	32.000.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.03.18	Belanja jasa dokumentasi	2.000.000,00	100,00	100,00	2.000.000,00
5.2.2.03.21	Belanja jasa dekorasi	24.000.000,00	17,00	16,67	4.000.000,00



5.2.2.06.01	Belanja cetak	5.500.000,00	19,00	18,18	1.000.000,00
5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00
5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda	4.500.000,00	45,00	44,44	2.000.000,00
5.2.2.10.07	Belanja sewa sound system	5.000.000,00	100,00	100,00	5.000.000,00
5.2.2.11.08	Belanja makanan dan minuman operasional	45.500.000,00	70,00	66,48	30.250.000,00
5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	25.000.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.21.03	Honorarium pembawa acara	700.000,00	72,00	71,43	500.000,00
5.2.2.21.05	Belanja jasa pagelaran kesenian/musik/tari/busana	3.000.000,00	100,00	100,00	3.000.000,00
2.16.1.01.01.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	240.745.000,00	0,00	0	0,00
2.16.1.01.01.15.02	Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama Di Bidang Budaya	240.745.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.01.09	Belanja bahan perlombaan	30.400.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.06.01	Belanja cetak	100.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	75.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.600.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.10.06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	1.200.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan	1.120.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	41.800.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar kota	13.400.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.21.01	Honorarium tenaga ahli	1.050.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.23.02	Belanja Barang/Jasa yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga	150.000.000,00	0,00	0	0,00
2.16.1.01.01.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	1.554.158.700,00	24,00	22,96	356.903.000,00
2.16.1.01.01.16.01	Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya	882.658.700,00	20,00	38,94	343.747.000,00
5.2.1.02.04	Upah Kerja	790.621.000,00	50,00	43,48	343.747.000,00
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	500.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.01.04	Belanja bahan pembersih	11.238.700,00	0,00	0	0,00
5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	480.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.01.08	Belanja bahan pelatihan / sosialisasi	8.090.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.01.19	Belanja Peralatan Kebersihan (Pakai Habis)	462.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.06.01	Belanja cetak	700.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.517.500,00	0,00	0	0,00
5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.000.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	500.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Pelatihan / Sosialisasi	2.712.500,00	0,00	0	0,00
5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	13.800.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	6.125.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.20.12	Belanja Transportasi/Akomodasi Pihak Ketiga	24.900.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.21.02	Honorarium instruktur/narasumber	7.550.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.47.27	Belanja Peralatan Kebersihan	462.000,00	0,00	0	0,00



5.2.3.11.09	Belanja modal pengadaan mesin potong rumput	10.000.000,00	0,00	0	0,00
2.16.1.01.01.16.02	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air	639.500.000,00	1,00	0,11	706.000,00
5.2.2.03.03	Belanja listrik	6.000.000,00	15,00	11,77	706.000,00
5.2.2.23.02	Belanja Barang/Jasa yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga	211.000.000,00	0,00	0	0,00
5.2.3.24.06	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian bangunan monumen	422.500.000,00	0,00	0	0,00
2.16.1.01.01.16.03	Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	32.000.000,00	40,00	38,91	12.450.000,00
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar kota	32.000.000,00	40,00	38,91	12.450.000,00
2.16.1.01.01.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	3.625.641.000,00	0,48	0	5.000.000,00
2.16.1.01.01.17.02	Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah	1.168.417.500,00	0,89	0	0,00
5.2.1.02.04	Upah Kerja	60.950.000,00	25,00	0	0,00
5.2.2.01.09	Belanja bahan perlombaan	9.500.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.01.10	Belanja dekorasi	28.500.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.01.14	Belanja tropy, hadiah, plakat dan cinderamata	16.750.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.01.15	Belanja karangan bunga	9.000.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.02.06	Belanja Bahan Pangan	8.000.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.03.15	Belanja jasa rias	1.500.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.03.18	Belanja jasa dokumentasi	5.500.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.03.21	Belanja jasa dekorasi	57.500.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.06.01	Belanja cetak	18.360.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	16.000.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.08.02	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	3.000.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	10.800.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.10.04	Belanja sewa generator	12.500.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda	98.550.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.10.06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	3.000.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.10.07	Belanja sewa sound system	96.500.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.10.08	Belanja sewa alat musik tradisional	5.000.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.687.500,00	0,00	0	0,00
5.2.2.11.08	Belanja makanan dan minuman operasional	200.470.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	19.200.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	151.000.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar kota	107.500.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.21.01	Honorarium tenaga ahli	10.200.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.21.03	Honorarium pembawa acara	5.150.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.21.05	Belanja jasa pagelaran kesenian/musik/tari/busana	3.400.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.22.02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	201.900.000,00	0,00	0	0,00



2.16.1.01.01.17.03	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	2.422.223.500,00	0,54	0,21	5.000.000,00
5.2.1.02.04	Upah Kerja	1.500.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.01.09	Belanja bahan perlombaan	101.500.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.01.14	Belanja trophy, hadiah, plakat dan cinderamata	18.000.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	20.000.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.03.15	Belanja jasa rias	30.000.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.03.18	Belanja jasa dokumentasi	11.000.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.03.21	Belanja jasa dekorasi	60.000.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.06.01	Belanja cetak	24.700.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.350.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	8.650.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	48.800.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	6.750.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.10.04	Belanja sewa generator	20.400.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda	152.000.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.10.06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	60.500.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.10.07	Belanja sewa sound system	60.000.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman penambah daya tahan tubuh	3.000.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.11.08	Belanja makanan dan minuman operasional	272.437.500,00	0,00	0	0,00
5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	10.750.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.14.02	Belanja pakaian adat daerah	73.750.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	78.850.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	65.500.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam kota	241.165.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar kota	767.421.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.20.12	Belanja Transportasi/Akomodasi Pihak Ketiga	3.900.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.21.01	Honorarium tenaga ahli	42.550.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.21.05	Belanja jasa pagelaran kesenian/musik/tari/busana	34.500.000,00	15,00	14,49	5.000.000,00
5.2.2.22.02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	197.250.000,00	0,00	0	0,00
2.16.1.01.01.17.04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pengembangan Keanekaragaman Budaya	35.000.000,00	0,00	0	0,00
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar kota	35.000.000,00	0,00	0	0,00
	JUMLAH	93.533.347.000,00	32,43	28,09	26.276.980.581,00



2.3 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

2.3.1 Hambatan dan Kendala Pendapatan

Pada Semester I Tahun 2019 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengelola satu jenis pendapatan yakni Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan tersebut berasal dari pendapatan penyelenggaraan pendidikan berupa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Menindaklanjuti Surat Keputusan Bupati Kab. Kotawaringin Barat No. 030/302.5/IV.II/BPKAD/2017 Tanggal 30 Nopember 2017 Tentang Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Gedung Aula ke Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Kotawaringin Barat. Hal ini menyebabkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak lagi mengelola pendapatan retribusi daerah sejak tahun 2017.

2.3.2 Hambatan dan Kendala Belanja

Realisasi belanja Semester I Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp96.391.293.219,00 atau 31,09% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp310.003.238.992. Secara keseluruhan realisasi belanja daerah tersebut 31,09%, akan tetapi apabila dilihat lebih rinci maka terdapat belanja/program/kegiatan yang mengalami kendala/hambatan dalam mencapai target belanja (pencapaian kurang dari 40%) antara lain :

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
LAPORAN HAMBATAN/KENDALA RENDAHNYA REALISASI BELANJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PERIODE 1 JANUARI SD 30 JUNI TAHUN 2019

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Penjelasan
1.01.1.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.600.000,00	0	0	Pengiriman surat sudah berbasis elektronik
1.01.1.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	351.840.000,00	89.308.828,00	25,38	Terlaksana sesuai schedule
1.01.1.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	16.600.000,00	2.342.200,00	14,1	Untuk pajak bulan Nopember 2019
1.01.1.01.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	652.302.000,00	153.617.390,00	23,55	Terlaksana sesuai schedule, Honorarium PPBJ, PjPHP, PPHP di bulan Desember 2019
1.01.1.01.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	183.639.000,00	65.042.700,00	35,41	Terlaksana sesuai schedule
1.01.1.01.01.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	62.370.000,00	3.675.000,00	5,89	Terlaksana sesuai schedule
1.01.1.01.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	154.740.440,00	0	0	Terlaksana sesuai schedule (kontrak per Juli 2019)



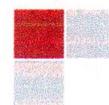
1.01.1.01.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	155.300.000,00	12.075.000,00	7,77	Terlaksana sesuai schedule
1.01.1.01.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27.000.000,00	3.150.000,00	11,66	Penyesuaian anggaran karena ada kegiatan yang dimasukkan
1.01.1.01.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	124.000.000,00	0	0	Proses
1.01.1.01.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	43.925.000,00	2.765.000,00	6,29	Proses
1.01.1.01.01.02.03	Pembangunan Gedung Kantor	2.279.800.000,00	0	0	Penyesuaian sumber dana
1.01.1.01.01.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	165.500.000,00	0	0	Penyesuaian sumber dana
1.01.1.01.01.02.10	Pengadaan Meubelair	145.000.000,00	0	0	Penyesuaian sumber dana
1.01.1.01.01.02.13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	186.676.000,00	0	0	Penyesuaian sumber dana
1.01.1.01.01.02.15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	172.250.000,00	22.084.332,00	12,82	Perbaiki sesuai kerusakan
1.01.1.01.01.02.17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	15.960.000,00	800.000,00	5,01	Tidak ada kendala
1.01.1.01.01.02.19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	37.300.000,00	4.116.000,00	11,03	Tidak ada kendala
1.01.1.01.01.03.01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	16.000.000,00	0	0	Dalam proses
1.01.1.01.01.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	123.450.000,00	0	0	Penyesuaian sumber dana
1.01.1.01.01.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	97.500.000,00	0	0	Selesai/Tinggal SPJ
1.01.1.01.01.05.02	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	237.312.500,00	0	0	Kegiatan dilaksanakan di Triwulan III 2019
1.01.1.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.725.000,00	0	0	Rasionalisasi Rp10.000.000,00
1.01.1.01.01.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	3.300.000,00	0	0	Rasionalisasi Rp2.700.000,00
1.01.1.01.01.15.01	Pembangunan Gedung Sekolah	738.120.000,00	0	0	Rp 288.000.000,00 mengalami rasionalisasi, Sementara sisanya masih menunggu proses pengadaan pada Aplikasi SPSE melalui PPBJ
1.01.1.01.01.15.03	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	715.439.000,00	0	0	Rp50.000.000,00 mengalami rasionalisasi, sisanya masih menunggu ketersediaan dana (anggaran kas) dan Transfer DAK FISIK
1.01.1.01.01.15.07	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary	225.500.000,00	0	0	Masih menunggu proses pengadaan pada aplikasi SPSE pada PPBJ
1.01.1.01.01.15.08	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	420.000.000,00	0	0	Menunggu lelang E-Catalog
1.01.1.01.01.15.09	Pengadaan Mebeluer Sekolah	218.737.500,00	0	0	Terkendala rasionalisasi anggaran
1.01.1.01.01.15.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah	200.112.500,00	0	0	Menunggu aliran kas dan masih proses pengadaan pada PPBJ
1.01.1.01.01.15.15	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	54.075.000,00	0	0	Aplikasi belum rilis
1.01.1.01.01.15.18	Pengembangan Data dan Informasi Pendidikan Anak Usia Dini	46.925.000,00	0	0	Aplikasi belum rilis



1.01.1.01.01.15.19	Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini	134.965.000,00	0	0	Menyesuaikan jadwal dari Kementerian
1.01.1.01.01.15.20	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang PAUD Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara PAUD	554.102.500,00	33.975.000,00	6,13	Dalam proses pengajuan Tahap I
1.01.1.01.01.15.22	Penyelenggaraan Akreditasi Jenjang PAUD	52.900.000,00	0	0	Dalam proses SPJ
1.01.1.01.01.15.23	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	40.600.000,00	0	0	Menunggu setelah Pencairan BOP Tahap I (BOP belum cair)
1.01.1.01.01.16.01	Pembangunan Gedung Sekolah	2.327.430.000,00	0	0	Penyesuaian sumber dana
1.01.1.01.01.16.02	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	2.586.100.000,00	0	0	Penyesuaian sumber dana
1.01.1.01.01.16.03	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	5.375.811.058,00	0	0	Penyesuaian sumber dana
1.01.1.01.01.16.04	Penambahan Ruang Guru Sekolah	464.800.000,00	0	0	Penyesuaian sumber dana
1.01.1.01.01.16.05	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir	514.300.000,00	0	0	Penyesuaian sumber dana
1.01.1.01.01.16.06	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.653.400.000,00	0	0	Penyesuaian sumber dana
1.01.1.01.01.16.07	Pembangunan Jaringan Instalasi Listrik Sekolah dan Perlengkapannya	90.000.000,00	0	0	Penyesuaian sumber dana
1.01.1.01.01.16.08	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary	1.689.802.440,00	0	0	Penyesuaian sumber dana
1.01.1.01.01.16.09	Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah	2.590.000.000,00	0	0	Penyesuaian sumber dana
1.01.1.01.01.16.10	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	400.000.000,00	0	0	Rasionalisasi
1.01.1.01.01.16.11	Pengadaan Mebeluer Sekolah	540.000.000,00	0	0	Penyesuaian sumber dana
1.01.1.01.01.16.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah	1.443.468.496,00	0	0	Penyesuaian sumber dana
1.01.1.01.01.16.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	1.658.500.000,00	0	0	Penyesuaian sumber dana
1.01.1.01.01.16.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	9.090.248.350,00	0	0	Penyesuaian sumber dana
1.01.1.01.01.16.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	226.700.000,00	0	0	Penyesuaian sumber dana
1.01.1.01.01.16.17	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB Serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD	3.951.050.500,00	252.990.500,00	6,4	Masih proses pencairan Tahap II
1.01.1.01.01.16.18	Penyediaan Buku Pelajaran Untuk SD/MI/SDLB	6.800.000.000,00	0	0	Masih proses pencairan Tahap II



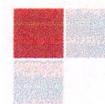
1.01.1.01.01.16.19	Pembinaan Kelembagaan Sekolah dan Manajemen Sekolah Dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Jenjang Sekolah Dasar	169.040.000,00	0	0	Dijadwalkan dilaksanakan pada Agustus 2019
1.01.1.01.01.16.20	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	875.000.000,00	157.853.800,00	18,04	SPJ masih dalam proses
1.01.1.01.01.16.21	Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar	119.130.000,00	0	0	Dijadwalkan bulan Oktober 2019
1.01.1.01.01.16.22	Penyediaan Beasiswa Prestasi	335.000.000,00	0	0	Dijadwalkan bulan September 2019
1.01.1.01.01.16.23	Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar	35.875.000,00	8.995.000,00	25,07	Masih proses revisi SPJ
1.01.1.01.01.17.01	Pembangunan Gedung Sekolah	1.633.255.000,00	0	0	Proses SPJ pekerjaan perencanaan, Pelaksana (Pihak ke III) lama menyampaikan dokumen ke Dinas
1.01.1.01.01.17.02	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	1.145.300.000,00	0	0	Rasionalisasi anggaran
1.01.1.01.01.17.03	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	1.171.400.000,00	0	0	Proses perencanaan
1.01.1.01.01.17.04	Penambahan Ruang Guru Sekolah	607.600.000,00	0	0	Proses perencanaan
1.01.1.01.01.17.05	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir	766.485.000,00	0	0	Proses perencanaan
1.01.1.01.01.17.06	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	2.040.000.000,00	0	0	Proses perencanaan
1.01.1.01.01.17.07	Pembangunan Jaringan Instalasi Listrik Sekolah dan Perlengkapannya	120.000.000,00	0	0	Dari hasil survey lapangan jarak dari tiang terakhir ke sekolah 750 m, sehingga perlu travo. Pagu yang ada tidak mencukupi. Untuk bisa pagu Disdikbud cukup, menunggu pemasangan jaringan listrik diadakan oleh Pemda di Pondok Pesantren Al-Miftah
1.01.1.01.01.17.08	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary	221.000.000,00	0	0	Proses perencanaan
1.01.1.01.01.17.09	Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah	2.719.240.000,00	0	0	Proses lelang dan perencanaan
1.01.1.01.01.17.10	Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa	225.000.000,00	0	0	Rasionalisasi Anggaran
1.01.1.01.01.17.11	Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah	1.620.000.000,00	0	0	Proses lelang
1.01.1.01.01.17.18	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	2.100.000.000,00	0	0	Proses survey, pembuatan spesifikasi
1.01.1.01.01.17.19	Pengadaan Mebeluer Sekolah	894.910.000,00	0	0	Proses survey, pembuatan spesifikasi/ dana tersedia di Triwulan III
1.01.1.01.01.17.20	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah	956.780.000,00	0	0	Proses SPD (DAK)
1.01.1.01.01.17.21	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	279.500.000,00	0	0	Rasionalisasi Anggaran
1.01.1.01.01.17.22	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.570.588.000,00	0	0	Rasionalisasi Anggaran, Proses ULP, Proses SPD (DAK)
1.01.1.01.01.17.23	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	300.000.000,00	0	0	Rasionalisasi Anggaran



1.01.1.01.01.17.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium dan Praktikum Sekolah	1.195.900.000,00	0	0	Rasionalisasi Anggaran, Proses SPD (DAK)
1.01.1.01.01.17.25	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	836.560.000,00	0	0	Rasionalisasi Anggaran, Proses SPD (DAK)
1.01.1.01.01.17.26	Pelatihan Penyusunan Kurikulum	81.580.000,00	0	0	Dijadwalkan bulan Agustus 2019
1.01.1.01.01.17.27	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP/Mts Serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SMP	4.587.487.500,00	1.127.385.000,00	24,57	Proses SPJ, BOP dan Rutin Masuk Triwulan II Tahap II
1.01.1.01.01.17.29	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	589.700.000,00	155.574.500,00	26,38	Proses SPJ
1.01.1.01.01.17.30	Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar	36.900.000,00	0	0	Dijadwalkan bulan September 2019
1.01.1.01.01.17.31	Penyediaan Beasiswa Prestasi	320.000.000,00	0	0	Proses ABT
1.01.1.01.01.18.01	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	56.799.995,00	0	0	Pelaksanaan bulan Juli 2019
1.01.1.01.01.18.03	Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi	360.000.000,00	0	0	Pelaksanaan bulan Juli 2019 dan menunggu perubahan anggaran
1.01.1.01.01.18.04	Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)	238.027.500,00	35.530.000,00	14,92	Sebagian proses SPJ , Bantuan transport masih perubahan
1.01.1.01.01.18.05	Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	317.777.500,00	25.962.500,00	8,17	Pelaksanaan bulan Juli 2019
1.01.1.01.01.18.06	Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik	3.902.290.000,00	1.154.240.900,00	29,57	Pembayaran insentif guru-guru TK baru terserap Triwulan I
1.01.1.01.01.18.07	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	108.600.000,00	11.659.600,00	10,73	Pelaksanaan bulan Agustus 2019
1.01.1.01.01.19.01	Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan	191.185.000,00	19.320.760,00	10,1	Pelaksanaan di bulan September 2019
1.01.1.01.01.19.02	Pelaksanaan Kerjasama Secara Kelembagaan Di Bidang Pendidikan	158.560.000,00	0	0	Pelaksanaan bulan Agustus 2019
1.01.1.01.01.19.03	Pembinaan Dewan Pendidikan	67.210.000,00	0	0	Adanya perubahan nomor rekening
1.01.1.01.01.19.04	Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan	58.800.000,00	0	0	Adanya perubahan nomor rekening
1.01.1.01.01.19.05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	27.730.521,00	0	0	Pelaksanaan di Triwulan III dan IV 2019
1.01.1.01.01.20.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal	1.533.554.000,00	0	0	Menunggu lelang E-Catalog dan proses pengajuan di KPPN
1.01.1.01.01.20.03	Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal	180.700.000,00	48.750.000,00	26,97	Kegiatan dilaksanakan di Triwulan III 2019
2.16.1.01.01.15.02	Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama Di Bidang Budaya	240.745.000,00	8.672.400,00	3,6	Pelaksanaan di Triwulan IV 2019 untuk hibah



2.16.1.01.01.16.01	Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya	882.658.700,00	343.747.000,00	38,94	Triwulan II, III dan IV 2019 dan ada perubahan transportasi sosialisasi
2.16.1.01.01.16.02	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air	639.500.000,00	706.000,00	0,11	Tidak disetujui pembayaran token listrik Betang
2.16.1.01.01.16.03	Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	32.000.000,00	12.450.000,00	38,9	Dilaksanakan Triwulan III dan IV Tahun 2019
2.16.1.01.01.17.02	Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah	1.168.417.500,00	0	0	Dilaksanakan bulan Oktober 2019 (4 Kegiatan)
2.16.1.01.01.17.03	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	2.422.223.500,00	39.000.800,00	1,61	1 SPJ menunggu proses revisi 2 Ada 4 (empat) kegiatan yang terjadwal mulai bulan Juli sd Desember 2019
2.16.1.01.01.17.04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pengembangan Keanekaragaman Budaya	35.000.000,00	0	0	Baru terealisasi 1 SPM



KEBIJAKAN AKUNTANSI

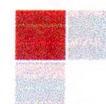
Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan. Kebijakan Akuntansi yang dipergunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2019 ini sebagian besar mengacu dan berpedoman kepada: (1) kebijakan akuntansi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1 s.d 11 termasuk Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan serta Interpretasi PSAP dan Buletin Teknis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SAP, dan (2) praktik-praktik akuntansi yang selama ini dilaksanakan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

3.1 Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi Keuangan Daerah

Informasi Keuangan disajikan dalam laporan keuangan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya. Jika menurut peraturan perundang-undangan, satu organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Satuan organisasi jika di Pemerintah Daerah disebut juga SKPD dan mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan dapat disebut dengan entitas. Entitas yang menyusun laporan terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan.

- a. Entitas Akuntansi adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seluruh Kabupaten Kotawaringin Barat yang mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan pada masing – masing SKPD sesuai dengan tanggung jawabnya. Laporan keuangan SKPD terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan, yang untuk selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk digabungkan menjadi laporan keuangan Pemerintah Daerah.



- b. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, dalam hal ini entitas pelaporan adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Laporan keuangan dimaksud terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan ini ditujukan dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban atas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2018, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk memenuhi kepentingan berikut:

- **Akuntabilitas**

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

- **Manajemen**

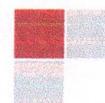
Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

- **Transparansi**

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

- **Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)**

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.



Asumsi Dasar

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

a) Asumsi Kemandirian Entitas

Asumsi kemandirian entitas, baik entitas pelaporan maupun akuntansi, berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat putusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.

b) Asumsi Kestinambungan Entitas

Laporan Keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

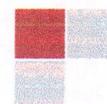
c) Asumsi Keterukuran dalam Satuan Uang (*Monetary Measurement*)

Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

3. 2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam menyusun laporan keuangan pemerintah kabupaten Kotawaringin Barat mengacu pada delapan prinsip, kedelapan prinsip tersebut yaitu :

- a. Basis Akuntansi
- b. Prinsip Nilai Historis



- c. Prinsip Realisasi
- d. Prinsip Subtansi Mengungguli Bentuk Normal
- e. Prinsip Periodisasi
- f. Prinsip Konsistensi
- g. Prinsip Pengungkapan Lengkap
- h. Prinsip Penyajian Wajar

Dari delapan prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

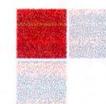
a. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Basis AkruaI untuk pengakuan pada Laporan: Neraca, Operasional, Perubahan Ekuitas. Basis AkruaI adalah pendapatan, beban dan kewajiban diakui pada saat terjadinya transaksi atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah bukan pada saat kas diterima/dibayar oleh kas daerah. Basis akruaI tercermin pada pendapatan-LO dan beban dalam Laporan Operasional, pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca.

Basis akruaI mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun LRA disusun berdasarkan basis kas. Artinya bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; demikian pula belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akruaI untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.



b. Nilai Historis (*historical cost*)

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat menerapkan nilai historis karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait. Aset Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

c. Realisasi (*realization*)

Anggaran pemerintah selama suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat masih diwajibkan menyusun LRA, maka pendapatan atau belanja kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah kas atau mengurangi.

d. Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*substance over form*)

Penyajian laporan diupayakan dengan wajar yaitu dimana transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka diungkapkan dengan jelas dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

e. Periodisitas (*periodicity*)

Laporan keuangan Pemerintah kabupaten Kotawaringin Barat dibagi menjadi periode-periode pelaporan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan, triwulanan, dan semesteran. Bulanan untuk laporan pendapatan, triwulan untuk Laporan LRA dan penjabarannya, semester untuk LRA, Laporan Operasional, Neraca, Arus Kas (PPKD), tahunan untuk LRA, Laporan Operasional, Neraca, Perubahan Ekuitas, Perubahan Saldo Anggaran lebih dan Arus Kas (PPKD) dan CALK.



3.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pengukuran pada masing-masing pos laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut:

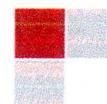
3.3.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah, sedangkan *Pendapatan-LO* adalah hak Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada akun SILPA pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- a. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki hak atas pendapatan
- b. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat menerima kas yang berasal dari pendapatan.



f. Konsistensi (*consistency*)

Konsistensi adalah perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain, selama dapat memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2019 tidak ada perubahan metode akuntansi.

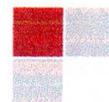
3.2.1 Proses Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, yang terdiri dari: PPKD sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) yang dijabat oleh Kepala DPKD Kabupaten Kotawaringin Barat. PPKD menyusun LKPD berdasarkan konsolidasi laporan-laporan keuangan SKPD, dan data serta catatan lainnya dari unit-unit yang terkait selaku entitas akuntansi.

Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 didasarkan atas data dan informasi yang disediakan oleh: Pejabat Pengelola Keuangan daerah (PPKD) yakni SKPKD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan pengelolaan APBD dan seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat selaku pengguna anggaran.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1 s.d. 11.

Dalam proses penyusunan konsolidasi Laporan Keuangan Semester I Tahun 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Bendahara Umum Daerah tetap menyediakan catatan dan dokumen serta informasi lain yang diperlukan dalam proses penyusunan konsolidasi Laporan Keuangan. Untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 (yang dipergunakan sebagai data pembanding atas realisasi per 31 Desember 2018) telah dilakukan audit oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dengan opini **“Wajar Tanpa Pengecualian”**.



Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih, misalnya:

- a. Timbulnya hak untuk menagih Pendapatan Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Parkir dan Retribusi Parkir.
- b. Timbulnya hak untuk menagih Pendapatan Pajak Reklame, Pajak Bumi dan Bangunan Retribusi, IMB, dan HO langsung ditetapkan didepan.

Pendapatan-LO yang diperoleh dari pajak reklame sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas dimana apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Barat kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dimuka. Pengkajian atas keterukuran dan ketersediaan yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pendapatan LRA dan Pendapatan LO diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing akan dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.



3.3.2 Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah, sedangkan **Beban** adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Belanja diakui pada saat :

- a. Pada saat diterbitkan SP2D LS;
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran;
- c. dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Beban diakui pada saat :

- a. Timbulnya kewajiban
- b. Terjadinya konsumsi aset
- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban adalah beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluinya



waktu. Contoh adalah penyusutan atau amortisasi. Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan dan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan. Beban yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan beban.

3.3.3 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

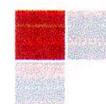
Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan Pembiayaan adalah Semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah yang berasal dari : penerimaan pinjaman, penjualan obligasi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Pengeluaran Pembiayaan adalah Semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain : Pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan pada Rekening Kas Umum Daerah.

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan asas bruto.



Akuntansi pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurang pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih atau kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto.

Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode pelaporan. Selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam Pos Silpa atau Sikpa.

3.3.4 Kebijakan Akuntansi Aset

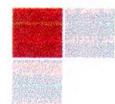
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.



Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya untuk mempermudah pemahaman atas pos-pos aset nonlancar yang disajikan di neraca.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi nonpermanen dan investasi permanen.

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Yang termasuk dalam Investasi permanen di Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah, yaitu :

1. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
2. PD. Agrotama Mandiri
3. PD. Bank Pengkreditan Rakyat Marunting Sejahterah
4. PT. Bank Kalteng
5. PT. JAMKRIDA

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klarifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

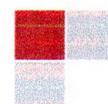


- b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam surat keterangan tanggungjawab mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah;
- c. Aset Tidak Berwujud, adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contohnya adalah hak paten, hak cipta, hak merk, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah. Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan aset tak berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut;
- d. Aset Lain-lain, yaitu aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.

3.3.5 Kebijakan Akuntansi Kewajiban dan Ekuitas

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban dapat timbul dari:

- a. Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*)

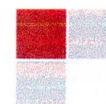


- a. Tanah, yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
- b. Gedung dan Bangunan, mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai;
- c. Peralatan dan Mesin, mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- d. Jalan, Irigasi dan Jaringan, mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai;
- e. Aset Tetap Lainnya, mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai
- f. Kontruksi Dalam Pengerjaan, mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode tertentu.

Aset Tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Yang termasuk di dalam Aset Lainnya adalah:

- a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran, menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran;



- b. Transaksi tanpa pertukaran (*no-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan
- c. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*)
- d. Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*)

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) adalah pungutan/potongan PFK yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten Kotawaringin Barat yang harus diserahkan kepada pihak lain. PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.

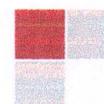
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Utang jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa perhitungan pihak ketiga (PFK) yang belum disetorkan kepihak lain harus dicatat sebagai utang perhitungan pihak ketiga pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam kategori bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.



Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

3.3.6 Kebijakan Akuntansi Konsolidasi

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana ditetapkan didalam peraturan perundang-undangan. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

Entitas akuntansi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Laporan keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

Laporan keuangan konsolidasian pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi yang meliputi SKPD dan PPKD.

Prosedur Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi yang meliputi SKPD dan PPKD dengan mengeliminasi akun timbal balik di Neraca. Akun-akun yang dieliminasi adalah RK SKPD dan RK PPKD.

3.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Dalam melaksanakan kebijakan akuntansi, ada beberapa hal khusus yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat antara lain sebagai berikut:

1. Pencatatan Persediaan

Pencatatan Persediaan menggunakan Metode Fisik dan Metode Penilaian Persediaan menggunakan Metode FIFO atau MPKP (Masuk Pertama Keluar Pertama), kecuali



Penilaian Persediaan obat termasuk obat untuk tanaman, hewan atau lainnya menggunakan Metode FIFO dengan mempertimbangkan batas yang sudah melebihi jangka waktu/kadaluarsa. Persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock opname), meliputi persediaan yang nilai satuannya relatif rendah dan perputarannya cepat, antara lain berupa barang konsumsi, barang pakai habis, barang cetakan, obat-obatan dan bahan farmasi, dan yang sejenis. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis retribusi, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan sediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

2. Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Penyisihan piutang tidak tertagih atau penyisihan/cadangan kerugian piutang dengan besaran prosentase sesuai dengan umur piutang tertentu sesuai dengan prosentase cadangan penyisihan piutang. Penggolongan kualitas piutang dilakukan dengan ketentuan:

a. Piutang Pajak

No	Kualitas Piutang Pajak	Taksiran Piutang Tak Tertagih (Penyisihan Piutang)
1.	Lancar (kurang dari 1 tahun)	5%
2.	Kurang Lancar (1 s/d 2 tahun)	10%
3.	Diragukan (2 s/d 3 tahun)	50%
4.	Macet (di atas 3 tahun)	100%

b. Piutang Retribusi

No	Kualitas Piutang Retribusi	Taksiran Piutang Tak Tertagih (Penyisihan Piutang)
1.	Lancar (sampai dengan jatuh tempo)	5%
2.	Kurang Lancar (1 s/d 6 bulan setelah jatuh tempo)	10%
3.	Diragukan (7 s/d 12 bulan setelah jatuh tempo)	50%



4.	Macet (lebih dari 12 bulan setelah jatuh tempo)	100%
----	---	------

c. Piutang Tuntutan Ganti Rugi

No	Kualitas Piutang Tuntutan Ganti Rugi	Taksiran Piutang Tak Tertagih (Penyisihan Piutang)
1.	Lancar (sampai dengan jatuh tempo)	5%
2.	Kurang Lancar (1 s/d 12 bulan setelah jatuh tempo)	10%
3.	Diragukan (13 s/d 24 bulan setelah jatuh tempo)	50%
4.	Macet (lebih dari 24 bulan setelah jatuh tempo)	100%

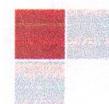
d. Piutang Karena Perikatan Perjanjian

No	Kualitas Piutang Karena Perikatan Perjanjian	Taksiran Piutang Tak Tertagih (Penyisihan Piutang)
1.	Lancar (sampai dengan jatuh tempo)	5%
2.	Kurang Lancar (satu bulan sejak tagihan pertama)	10%
3.	Diragukan (satu bulan sejak tagihan kedua)	50%
4.	Macet (satu bulan sejak tagihan ketiga)	100%

3. Pengakuan Belanja Modal

Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi asset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :

- a) Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b) Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual; dan
- c) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi asset tetap yang telah ditetapkan. Khusus untuk tanah dan konstruksi dalam pengerjaan berapapun nilai perolehannya



harus dikapitalisasi. Penetapan nilai minimal materialitas pada saat proses penganggaran di DPA.

4. Pengakuan belanja pemeliharaan

Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitaliasi sebagai aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- a) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara :
Bertambah ekonomis/efisien, dan/atau, bertambah umur ekonomis, dan/atau, bertambah volume, dan/atau, bertambah kapasitas produksi, bertambah estetika/keindahan/kenyamanan
- b) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap tersebut melebihi 1 tahun (jangka panjang)
Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan

Bila ada pengeluaran bersifat rutin untuk memperbaiki/memelihara aset tetap meskipun jumlahnya material, tetapi digolongkan sebagai *revenue expenditure*. Sedangkan *revenue expenditure* mempunyai makna pengeluaran untuk mempertahankan kapasitas yang ada saat ini (*Current year*).

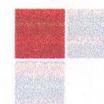
5. Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap

Kapitalisasi adalah Penentuan nilai buku terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.

Pengeluaran-pengeluaran dalam rangka perolehan aset merupakan belanja modal apabila memenuhi semua kriteria berikut:

Batasan jumlah biaya kapitalisasi perolehan awal aset tetap:

1. Nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap peralatan dan mesin adalah pengeluaran pengadaan baru untuk per satuan atau per unit peralatan dan mesinsama dengan atau lebih dari Rp.300.000,00.
2. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi untuk gedung dan bangunan yang nilainya pengeluarannya sama dengan atau lebih dari Rp.10.000.000,00 dikecualikan untuk pengeluaran secara bertahap yang secara substansi merupakan perolehan atau bagian



gedung dan bangunan seperti : teralis, sekat partisi, plafon, tambah daya listrik/instalasi listrik, keramik, pagar dll berapapun nilainya dikapitalisasi.

3. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi untuk jalan/irigasi/jaringan yang nilainya pengeluarannya sama dengan atau lebih dari Rp.10.000.000,00 dikecualikan untuk pengeluaran secara bertahap/lanjutan yang secara substansi merupakan perolehan atau bagian jalan/irigasi/jaringan seperti: trotoar, plangson dll.
4. Sedangkan untuk aset tetap renovasi yang nilai pengeluarannya sama dengan atau lebih dari Rp.10.000.000,00

6. Penyusutan Aset Tetap

Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari 12 bulan atau 1 periode akuntansi. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun.

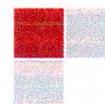
Metode Penyusutan adalah Penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset serta bukan alokasi biaya. Metode Penyusutan yang digunakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah metode Garis Lurus dengan rumusan :

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Pengakuan Penyusutan untuk Perolehan aset tetap sebelum tahun 2017 atau sebelum diberlakukan akuntansi basis akrual proses penyusutan dimulai awal tahun berikutnya, untuk perolehan aset tetap mulai tahun 2017 atau setelah diberlakukan basis akrual pengakuan penyusutan dilakukan 1 (satu) hari setelah tanggal BAST.

7. Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Surplus Defisit atau Laporan Operasional (LO) dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.



Dalam kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*).



PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

4.1 Rincian dari Penjelasan Masing-masing Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD

4.1.1 Penjelasan Pos pos Laporan Realisasi Anggaran

4.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pada tahun 2019 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan hanya mengelola satu jenis pendapatan yakni Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan tersebut berasal dari pendapatan lainnya yaitu penyelenggaraan pendidikan berupa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 910/106/SJ Tanggal 11 Januari 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada point 1 dan 2 yakni :

‘Dana BOS merupakan dana transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi yang penyalurannya dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disebut RKUN ke Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD Provinsi’.

‘Dana BOS sebagaimana dimaksud pada angka 1, selanjutnya disalurkan oleh Pemerintah Provinsi dari RKUD langsung kepada masing-masing Satuan Pendidikan melalui mekanisme hibah, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya Dana BOS dimaksud pada RKUD Provinsi.’

Kemudian, dalam pengakuan pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan pada poin 4 yakni:

‘Berdasarkan Paragraf 21 PSAP Nomor 02 Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa Pendapatan LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Interpretasi Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan Yang Diterima Pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah dijelaskan bahwa pengakuan pendapatan ditentukan oleh BUN/BUD sebagai pemegang otoritas



dan bukan semata-mata oleh RKUN/RKUD sebagai salah satu tempat penampungnya. Selanjutnya penjelasan IPSAP Nomor 02 bahwa pendapatan juga mencakup antara lain pendapatan kas yang diterima Satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUN/RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUN/BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah'.

4.1.1.2 Belanja

No.	Uraian	Realisasi	
		Semester I 2019	2018
1	Belanja Pegawai	91.218.246.224,00	179.757.022.851,00
2	Belanja Barang dan Jasa	5.165.046.995,00	43.396.972.481,34
3	Belanja Modal	8.000.000,00	33.449.710.805,00

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

4.1.1.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Semester I Tahun 2019 sebesar Rp91.218.246.224,00 atau 41,75 persen dari yang dianggarkan. Realisasi belanja pegawai tersebut termasuk didalamnya pembayaran untuk beban tahun 2018 yang menjadi utang jangka pendek pada neraca tahun 2018 sebesar Rp390.642.680,00 yang dibayarkan melalui SP2D sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DAFTAR PENYELESAIAN UTANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 30 JUNI TAHUN 2019

No.	Uraian	Jumlah utang TA. 2018	Penambahan/Pengurangan utang	Jumlah utang baru	Jumlah utang yang diselesaikan	Penyelesaian Utang		
						Jumlah	Tanggal SP2D	Nomor SP2D
1	Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai untuk Pegawai di Lingkungan Dinas Dikbud Kab. Kotawaringin Barat Ub. Desember 2018 TA 2019	297.134.963	-	-	297.134.963	297.134.963	23/01/2019	00069/BTL/SP2D-LS/2019



2	Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan untuk Pegawai Cabang Dinas Dikbud Kecamatan Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Ub.Desember 2018 TA 2019	19.970.223	-	-	19.970.223	19.970.223	23/01/2019	00064/BT L/SP2D-LS/2019
3	Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan untuk Pegawai Cabang Dinas Dikbud Kecamatan Arut Utara Kab. Kotawaringin Barat Ub.Desember 2018 TA 2019	7.945.448	-	-	7.945.448	7.945.448	23/01/2019	00063/BT L/SP2D-LS/2019
4	Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan untuk Pegawai Cabang Dinas Dikbud Kecamatan Kotawaringin Lama Kab. Kotawaringin Barat Ub.Desember 2018 TA 2019	11.430.175	-	-	11.430.175	11.430.175	23/01/2019	00068/BT L/SP2D-LS/2019
5	Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan untuk Pegawai Cabang Dinas Dikbud Kecamatan Pangkalan Lada Kab. Kotawaringin Barat Ub.Desember 2018 TA 2019	8.825.956	-	-	8.825.956	8.825.956	23/01/2019	00067/BT L/SP2D-LS/2019
6	Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan untuk Pegawai Cabang Dinas Dikbud Kecamatan Pangkalan Banteng Kab. Kotawaringin Barat Ub.Desember 2018 TA 2019	11.976.600	-	-	11.976.600	11.976.600	23/01/2019	00066/BT L/SP2D-LS/2019
7	Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan untuk Pegawai Cabang Dinas Dikbud Kecamatan Kumai Kab. Kotawaringin Barat Ub.Desember 2018 TA 2019	13.661.999	-	-	13.661.999	13.661.999	23/01/2019	00065/BT L/SP2D-LS/2019
8	Kekurangan Tunjangan Fungsional Perubahan Gaji Ub. Januari 2019	13.348.000	-	-	13.348.000	13.348.000	16/05/2019	00598/BT L/SP2D-LS/2019
9	Kekurangan gaji berdasarkan perubahan gaji ub. Pebruari 2019	5.213.316	-	-	5.213.316	5.213.316	16/05/2019	00597/BT L/SP2D-LS/2019
10	Kekurangan Tunjangan Fungsional Perubahan Gaji Ub. Pebruari 2019	1.136.000	-	-	1.136.000	1.136.000	16/05/2019	00598/BT L/SP2D-LS/2019
Jumlah		390.642.680	-	-	390.642.680	390.642.680		-

4.1.1.2.2 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Semester I Tahun 2019 sebesar Rp5.165.046.995,00 atau 15,06 persen dari yang dianggarkan. Terdiri atas realisasi dari APBD sebesar Rp5.165.046.995,00 dan dari untuk realisasi dana BOS belum terekap datanya.



4.1.1.2.4 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Semester I Tahun 2019 sebesar Rp8.000.000,00 atau 0,01 persen dari yang dianggarkan. Dari jumlah realisasi Belanja Modal tersebut menambah nilai Aset Tetap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) sebesar Rp8.000.000,00. dengan kata lain semua realisasi Belanja Modal menghasilkan Aset Tetap yang menambah Aset Tetap Semester I Tahun 2019.

4.1.2 Penjelasan Pos pos Laporan Operasional

4.1.2.1 Pendapatan-LO

Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah untuk Semester I tahun 2019.

Adapun penjelasan masing-masing akun pendapatan-LO dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah

Rekening ini menggambarkan hak pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Laporan Operasional untuk Semester I Tahun 2019. Selama tahun anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak mengelola PAD. Hal ini dikarenakan adanya pengalihan atas Gedung Aula Dinas ke Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Kab Kotawaringin Barat sesuai Surat Keputusan Bupati Kab. Kotawaringin Barat No. 030/302.5/IV.II/BPKAD/2017 Tanggal 30 Nopember 2017 Tentang Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah.

b. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Rekening ini menggambarkan hak pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat atas Lain-lain Pendapatan yang Sah pada Laporan Operasional untuk Semester I Tahun 2019.

4.1.2.2 Beban-LO

Beban LO merupakan beban/pengeluaran yang telah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada Semester I Tahun 2019, sebagai berikut :

a. Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan beban Beban Pegawai periode 1 Januari 2019 sampai dengan 30 Juni 2019 yaitu sebesar Rp90.827.603.544,00.



b. Beban Persediaan

Beban Persediaan merupakan beban pemakaian atas barang-barang persediaan dari APBD periode 1 Januari 2019 sampai dengan 30 Juni 2019 yaitu sebesar Rp2.042.913.150,00

c. Beban Jasa

Beban Jasa merupakan beban jasa atas pemberian jasa dari APBD periode 1 Januari 2019 sampai dengan 30 Juni 2019 sebesar Rp2.485.855.618,00

d. Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan merupakan beban pemeliharaan atas barang-barang dari APBD periode 1 Januari 2019 sampai dengan 30 Juni 2019 yaitu sebesar Rp34.042.532,00.

e. Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas merupakan beban perjalanan dinas dari APBD 1 Januari 2019 sampai dengan 30 Juni 2019 yaitu sebesar Rp576.820.195,00.

f. Beban Hibah

Beban hibah merupakan beban hibah periode 1 Januari 2019 sampai dengan 30 Juni 2019 yaitu sebesar Rp22.650.000,00.

g. Beban Penyusutan

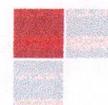
Beban Penyusutan merupakan Beban Penyusutan yang berasal dari perhitungan penyusutan aset tetap sampai dengan 30 Juni 2019 sebesar Rp4.826.889.160,08.

h. Beban Amortisasi

Beban Amortisasi merupakan saldo Beban Amortisasi yang berasal dari perhitungan penyusutan aset tidak berwujud dari APBD dan dana BOS per 30 Juni 2019 sebesar Rp16.446.550,00.

4.1.2.3 Surplus/Defisit dari Operasi

Surplus/Defisit - LO merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional periode 1 Januari 2019 sampai dengan 30 Juni 2019 yaitu defisit sebesar (Rp100.833.220.749,08).



4.1.3 Penjelasan Pos pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Saldo awal ekuitas tahun 2019 sebesar (Rp725.097.873.638,65) merupakan saldo awal 1 Januari 2019.
- b. Surplus/defisit-LO sebesar (Rp100.833.220.749,08) merupakan defisit atas kegiatan operasional (basis akrual) yang mengurangi nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat per 30 Juni 2019.

Sehingga saldo akhir ekuitas sebesar (Rp825.931.094.387,73)

4.1.4 Penjelasan Pos pos Neraca

4.1.4.1 Aset Lancar

4.1.4.1.1 Kas dan Setara Kas

Saldo Kas di Kas Daerah per 30 Juni 2019 sebesar Rp0,00.

4.1.4.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

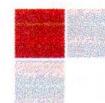
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang masih ada di Bendahara Pengeluaran SKPD per 30 Juni 2019 yaitu sebesar Rp673.030.000,00.

4.1.4.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan penerimaan pendapatan tahun berjalan yaitu sebesar Rp0,00.

4.1.4.1.4 Kas BOS

Besarnya Saldo BOS per 30 Juni 2019 sebesar Rp0, karena pada Semester I Tahun 2019 belum tercatat Kas BOS.



4.1.4.1.5 Persediaan

Persediaan per 30 Juni 2019 sebesar Rp76.829.632,00

4.1.4.2 Aset Tetap

Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2019 sebesar Rp326.306.100.923,32.

Posisi Aset Tetap dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Uraian	30 Juni 2019	31 Desember 2018
1	Tanah	22.182.850.600,06	22.182.850.600,06
2	Peralatan dan Mesin	36.133.431.193,14	36.125.431.193,14
3	Gedung dan Bangunan	246.334.292.028,40	246.334.292.028,40
4	Jalan jaringan dan Irigasi	956.249.520,00	956.249.520,00
5	Aset Tetap Lainnya	20.079.387.308,00	20.079.387.308,00
6	KDP	619.890.273,72	619.890.273,72
	Jumlah	326.306.100.923,32	326.298.100.923,32

4.1.4.2.1 Tanah

Nilai Tanah per 30 Juni 2019 sebesar Rp22.182.850.600,06

Mutasi/perubahan Tanah tersebut adalah sebagai berikut:

Saldo awal tanah	22.182.850.600,06
Penambahan tanah:	0
Pengadaan Belanja Modal Tanah Tahun 2018 Yang diakui sebagai Aset Tanah	
Pengadaan Belanja Modal Selain Tanah Yang dikapitalisasi sebagai Aset Tanah	
Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2018	
Hasil Penilaian Tahun 2018	0
Koreksi kesalahan Pencatatan sebelumnya	
Penetapan Status Penggunaan-Masuk	
Mutasi Masuk	0
Hibah	
Reklasifikasi masuk	
Pengurangan tanah :	0
Koreksi kesalahan pencatatan tahun lalu	0
Penghapusan	
Penetapan Status Penggunaan-Keluar	
Mutasi Keluar	
Reklasifikasi keluar	
Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena P3D	0
Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena Pemanfaatan oleh Pihak Lain	
Hibah	
Saldo Akhir Tanah	22.182.850.600,06



Tidak ada penambahan dan pengurangan Aset Tanah selama Semester I Tahun 2019.

4.1.4.2.2 Peralatan dan Mesin

Nilai Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2019 sebesar Rp36.133.431.193,14

Mutasi/perubahan peralatan dan mesin tersebut adalah sebagai berikut :

Saldo Awal Peralatan dan Mesin	36.125.431.193,14
Penambahan Peralatan dan Mesin:	8.000.000,00
Pengadaan Belanja Modal Peralatan & Mesin Tahun 2019	8.000.000,00
Pengadaan Belanja Modal Selain Peralatan & Mesin Yang dikapitalisasi sebagai Aset Peralatan & Mesin	0
Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2018	
Hibah	
Koreksi kesalahan Pencatatan sebelumnya	
Hasil Penilaian Tahun 2018	
Penetapan Status Penggunaan-Masuk	
Mutasi Masuk	
Reklasifikasi masuk	
Pengurangan Peralatan dan Mesin :	0
Koreksi kesalahan pencatatan sebelumnya	
Hibah	
Penetapan Status Penggunaan-Keluar	
Mutasi Keluar	
Reklasifikasi keluar	
Reklasifikasi ke ekstrakom	0
Reklasifikasi ke ekstrakom dari APBD	0
Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena Rusak Berat	
Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena P3D	0
Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena Lelang 2018	
Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena akan dilelang di 2019	
Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena pemanfaatan oleh pihak lain	
Saldo Akhir Peralatan dan Mesin	36.133.431.193,14

Penambahan Peralatan dan Mesin berasal dari belanja modal pengadaan kulkas sebesar Rp8.000.000,00

4.1.4.2.3 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 sebesar Rp246.334.292.028,40

Mutasi/perubahan Gedung dan Bangunan tersebut adalah sebagai berikut :



Saldo Awal Gedung dan Bangunan	246.334.292.028,40
Penambahan :	0
Pengadaan Belanja Modal Gedung & Bangunan Tahun 2018 Yang diakui Aset Gedung & Bangunan	0
Pengadaan Belanja Modal Selain Gedung & Bangunan Yang dikapitalisasi sebagai Aset Gedung & Bangunan	0
Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2018 Yang dikapitalisasi sebagai Aset Gedung & Bangunan	
Penilaian Tahun 2018	
Hibah	
Koreksi kesalahan Pencatatan sebelumnya	
Penetapan Status Penggunaan-Masuk	
Mutasi Masuk	0
Reklasifikasi masuk	
Pengurangan :	0
Koreksi kesalahan pencatatan sebelumnya	
Hibah	
Penetapan Status Penggunaan-Keluar	
Mutasi Keluar	
Reklasifikasi keluar	
Reklasifikasi ke ekstrakom	
Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena Rusak Berat	
Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena P3D	0
Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena Lelang 2018	0
Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena akan dilelang di 2019	0
Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena pemanfaatan oleh pihak lain	
Saldo Akhir Gedung dan Bangunan	246.334.292.028,40

Tidak ada penambahan dan pengurangan Aset Gedung dan Bangunan selama Semester I Tahun 2019.

4.1.4.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2019 sebesar Rp956.249.520,00.

Mutasi/perubahan Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut adalah sebagai berikut :

Saldo Awal Jalan, Irigasi dan Jaringan	956.249.520,00
Penambahan :	0
Pengadaan Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan Tahun 2018 Yang diakui sebagai Aset Jalan, Irigasi & Jaringan	-
Pengadaan Belanja Modal Selain Jalan, Irigasi & Jaringan Yang dikapitalisasi sebagai Aset Jalan, Irigasi & Jaringan	
Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2018	
Penilaian Tahun 2018	
Hibah	
Koreksi kesalahan pencatatan tahun lalu	
Penetapan Status Penggunaan-Masuk	
Mutasi Masuk	0
Reklasifikasi masuk	
Pengurangan :	0
Koreksi kesalahan pencatatan tahun lalu	
Penetapan Status Penggunaan-Keluar	
Mutasi Keluar	
Reklasifikasi keluar	
Reklasifikasi ke ekstrakom	
Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena Rusak Berat	



Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena P3D	0
Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena Lelang 2018	
Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena akan dilelang di 2019	
Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena pemanfaatan oleh pihak lain	
Hibah	
Investasi/Penyertaan Modal	
Saldo Akhir Jalan, Irigasi dan Jaringan	956.249.520,00

Tidak ada penambahan dan pengurangan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan selama Semester I Tahun 2019.

4.1.4.2.5 Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2019 sebesar Rp20.079.387.308,00.

Mutasi/perubahan Aset Tetap Lainnya tersebut adalah sebagai berikut:

Saldo Awal Aset Tetap Lainnya	20.079.387.308,00
Penambahan :	0
Pengadaan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2018 Yang diakui sebagai Aset Tetap Lainnya	0
Pengadaan Belanja Modal Selain Aset Tetap Lainnya Yang dikapitalisasi sebagai Aset Tetap Lainnya	0
Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2018	
Penilaian Tahun 2018	
Hibah	
Koreksi kesalahan pencatatan tahun lalu	
Penetapan Status Penggunaan-Masuk	
Mutasi Masuk	
Reklasifikasi masuk	
Pengurangan :	0
Koreksi kesalahan pencatatan tahun lalu	
Penghapusan	
Hibah	
Penetapan Status Penggunaan-Keluar	
Mutasi Keluar	
Reklasifikasi keluar	
Reklasifikasi ke ekstrakom	
Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena Rusak Berat	
Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena P3D	0
Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena Lelang 2018	
Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena akan dilelang di 2019	
Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena pemanfaatan oleh pihak lain	
Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
Saldo Akhir Aset Tetap Lainnya	20.079.387.308,00

Tidak ada penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya selama Semester I Tahun 2019.



4.1.4.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 30 Juni 2019 sebesar Rp619.890.273,72

Mutasi/perubahan Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut adalah sebagai berikut :

Saldo Awal Kontruksi Dalam Pengerjaan	619.890.273,72
Penambahan :	-
Pengadaan Belanja Modal Tahun 2018	
Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2018	
Hibah	
Koreksi kesalahan pencatatan tahun lalu	
Penetapan Status Penggunaan-Masuk	
Mutasi Masuk	
Reklasifikasi masuk	
Pengurangan :	-
Koreksi kesalahan pencatatan tahun lalu	
Penghapusan	
Penetapan Status Penggunaan-Keluar	
Mutasi Keluar	
Reklasifikasi keluar	
Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
Saldo Akhir Konstruksi Dalam Pengerjaan	619.890.273,72

Tidak ada penambahan dan pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan selama Semester I Tahun 2019.

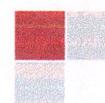
4.1.4.2.7 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan merupakan hasil koreksi penyusutan pada aset tetap SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari tahun ke tahun sampai dengan tanggal neraca, sedangkan penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap. Akumulasi Penyusutan per 30 Juni 2019 adalah (Rp69.802.704.716,01).

4.1.4.3 Aset Lainnya

Nilai Aset Lainnya per 30 Juni 2019 sebesar Rp9.209.472.570,48 Terdiri atas :

1. Aset Tak Berwujud sebesar Rp297.303.500,00
2. Amortisasi senilai (Rp247.016.550,00)



3. Aset lain-lain senilai Rp9.159.185.620,48

4.1.4.3.1 Tagihan Penjualan Angsuran

Tidak ada tagihan penjualan angsuran sampai dengan 30 Juni 2019.

4.1.4.3.2 Tuntutan Ganti Rugi

Tidak ada tuntutan ganti rugi sampai dengan 30 Juni 2019.

4.1.4.3.3 Tagihan Lainnya

Tidak ada tagihan lainnya sampai dengan 30 Juni 2019.

4.1.4.3.4 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan tagihan piutang lainnya yang mempunyai masa tagih lebih dari 1(satu) tahun. Tidak ada tagihan piutang dari kemitraan dengan pihak ketiga sampai dengan tanggal 30 Juni 2019.

3.1.4.3.5 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2019 sebesar Rp297.303.500,00

Mutasi/perubahan saldo Aset Tak Berwujud tersebut adalah sebagai berikut :

Saldo awal Aset Tak Berwujud	297.303.500,00
Penambahan :	0
Pengadaan Belanja Modal Tak Berwujud Tahun 2018 Yang diakui sebagai Aset Tak Berwujud	
Pengadaan Belanja Modal Selain Tak Berwujud Yang dikapitalisasi sebagai Aset Tak Berwujud	0
Utang yang diakui sebagai penambah Aset Tak Berwujud 2018	
Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2018	
Penilaian Tahun 2018	
Hibah/Bantuan dana Propinsi	
Koreksi kesalahan pencatatan tahun lalu	
Penetapan Status Penggunaan-Masuk	
Mutasi Masuk	
Reklasifikasi masuk	
Pengurangan :	0
Koreksi kesalahan pencatatan tahun lalu	
Penghapusan	
Hibah	
Penetapan Status Penggunaan-Keluar	
Mutasi Keluar	
Reklasifikasi ke Aset Tetap	



Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena Rusak Berat	
Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena P3D	0
Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena Lelang 2018	
Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena akan dilelang di 2019	
Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena pemanfaatan oleh pihak lain	
Reklasifikasi keluar	
Saldo Akhir Aset Tak Berwujud	297.303.500,00

Tidak ada penambahan dan pengurangan Aset Tak Berwujud selama Semester I Tahun 2019

4.1.4.3.6 Amortisasi

Saldo Amortisasi per 30 Juni 2019 sebesar (Rp247.016.550,00) yang merupakan akumulasi amortisasi sampai dengan Semester I Tahun 2019.

3.1.4.3.6 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain per 30 Juni 2019 sebesar Rp9.159.185.620,48

Mutasi/perubahan saldo Aset Tak Berwujud tersebut adalah sebagai berikut :

Saldo awal Aset Lain- Lain (RB)	9.159.185.620,48
Penambahan :	0
Penetapan Status Penggunaan-Masuk	
Mutasi Masuk	
Reklasifikasi masuk karena Rusak Berat	-
Reklasifikasi masuk karena P3D	0
Reklasifikasi masuk karena Lelang 2018	0
Reklasifikasi masuk karena akan dilelang di 2019	0
Reklasifikasi masuk karena pemanfaatan oleh pihak lain	-
Hibah	
Hasil Penilaian Tahun 2018	
Pengurangan :	0
Koreksi atas aset Rp.1 yg dinilai	
Koreksi Double Catat	
Penghapusan karena P3D	0
Penghapusan karena lelang 2018	0
Hibah	
Penetapan Status Penggunaan-Keluar	
Mutasi Keluar	
Reklasifikasi ke Aset Tetap	
Reklasifikasi keluar	
Saldo akhir Aset Lain-Lain	9.159.185.620,48

Tidak ada penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain selama Semester I Tahun 2019



3.1.4.3.7 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan per 30 Juni 2019 sebesar (Rp69.802.704.716,01).

4.1.4.4 Kewajiban

4.1.4.4.1 Kewajiban Jangka Pendek

4.1.4.4.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Saldo Utang Perhitungan Fihak Ketiga per 30 Juni 2019 sebesar Rp0,00.

4.1.4.4.1.2 Pendapatan Diterima Di Muka

Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2019 sebesar Rp0,00

4.1.4.4.1.3 Utang Belanja

Saldo Utang Belanja per 30 Juni 2019 sebesar Rp4.193.800,00

Rincian Utang Belanja Per 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DAFTAR UTANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2019

No.	Uraian	Jumlah hutang lama	Penambahan /Pengurangan Hutang	Jumlah hutang baru	Jumlah hutang sd 30 Juni 2019	Keterangan
1	Tunjangan Kesejahteraan PNS Tahun 2017 : an. MURYATI ub. Nopember sd Desember 2017 Guru SDN 1 Bumi Harjo Kec. Kumai	1.875.900	-	-	1.875.900	Dianggarkan pada Tahun 2019



an. ANSHARI DHAHA ub. Desember 2017 Guru SDN 2 Sungai Cabang Kec. Kumai	677.300	-	-	677.300
an. SUPARLAN ub. Nopember sd Desember 2017 Guru SDN 2 Pandu Senjaya Kec. Pangkalan Lada	1.640.600	-	-	1.640.600
Jumlah	4.193.800	-	-	4.193.800

Terdapat utang tahun 2017 yang belum diselesaikan berupa Tunjangan Kesejahteraan Pegawai senilai Rp4.193.800,00 karena dianggarkan pada APBD-P Tahun 2019.

4.1.4.4.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 30 Juni 2019 sebesar Rp0,00

4.1.4.5 Ekuitas

4.1.4.5.1 Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2019 sebesar (Rp825.931.094.387,73).

4.1.4.5.2 RK-PPKD

RK-PPKD per 30 Juni 2019 sebesar Rp1.093.674.532.813,05

4.2 Informasi Tambahan

4.2.1 Rekening Pemerintah

Rekening Pemerintah yang dikelola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kotawaringin Barat yakni 400-002-000000082-1 an. Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kotawaringin Barat pada Bank Pembangunan Kalimantan Tengah.



LAMPIRAN-LAMPIRAN